

**LAPORAN EVALUASI
HASIL RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN
2023

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun Laporan Triwulan IV tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai langkah nyata penerapan evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan.

Laporan Evaluasi kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023. Proses penyusunan evaluasi 2023 mengacu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026, dan telah dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja/kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai akhir triwulan IV tahun anggaran 2023.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstrutif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban, kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peninghkatan kinerja Dinas Kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Pangkalan Bun, Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



ACHMAD ROIS, SKM, M.Kes
NIP.19691104 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan.....	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	.4
1.4 Sistematika Penyajian Laporan.....	.4
 Bab II Perencanaan Pembangunan.....	5
2.1 Visi dan Misi.....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	6
2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	6
 Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja.....	14
3.1 Capaian Kinerja Sasaran (tambahan penjelasan perbandingan target tahunan terhadap target akhir RENSTRA).....	14
3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan SPM (Bagi Perangkat yang mengampu).....	26
3.3 Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan.....	30
3.4 Capaian kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan.....	84
 Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.	139
4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat.....	139
4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya.....	140
 Bab V Penutup.....	141
5.1 Kesimpulan.....	142
5.2 Rekomendasi.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023. Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi kinerja yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaankinerja dan keselarasan antara APBD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan. Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 desember 2023. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dan 2025.

Evaluasi terhadap hasil rencana kerja mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dilaksanakannya evaluasi hasil rencana kerja triwulan IV tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor; 79 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi hasil rencana kerja dimaksud untuk memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran renstra Dinas Kesehatan serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan dari Evaluasi hasil rencana kerja adalah :

1. Mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja
2. Mengetahui realisasi penyerapan dana
3. Mengetahui kendala yang dihadapi

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan evaluasi hasil rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyajian Laporan

BAB II : Perencanaan Pembangunan, menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.

BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja, menjelaskan tentang capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan/sub kegiatan, rekapitulasi evaluasi terhadap rencana kerja perangkat daerah

BAB IV : Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian kinerja, menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat, serta tindak lanjut bagi pelaksanaan berikutnya

BAB V : Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006 -2025 Kabupaten Kotawaringin barat terdapat dua misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu : *Misi ke delapan (8) “Mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan “dan Misi ke 2“ Mewujudkan Tata pemerintahan yang Baik”.*

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan.

Tujuan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan mengikuti Rencana pembangunan Daerah(RPD) yaitu *“Misi 8 dengan tujuan ke V Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Misi ke 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik tujuan ke IV Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif”.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah Angka Harapan Hidup, dengan target di tahun 2026 angka harapan hidup mencapai usia 70,98 tahun.

2. Sasaran.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan agar tujuan strategis dapat tercapai adalah:

1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat indikator yang digunakan:

- a) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
- b) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup.
- c) Prevalensi Balita Stunting .
- d) Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk.
- e) Insidensi HIV Per 100.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV.

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dibidang Kesehatan Indikator yang digunakan adalah Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target disetiap tahunnya adalah 100%.
3. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 100% di tahun 2026.

Tabel Indikator dan Target Tujuan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2023-2026

Tujuan	SasaranStrategis	IndikatorTujuan/ Sasaran	Target Kinerja				Satuan
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	70,74	70,82	70,9	70,98	Tahun
		1. Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	194	183	173	163	Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
		2. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	12,3	12,2	12,1	12,0	Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
		3. Prevalensi Stunting	12,4	12,2	12,1	12,0	
		4. InsidensiTubekulosis per 100.000 Penduduk	180	175	170	165	Per 100.000 penduduk
		5.Insidensi HIV Per 100.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV	0,18	0,18	0,18	0,18	Per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV
	2.Terpenuhinya Kebutuhan dasar kesehatan masyarakat	IndeksPencapaian SPM	100	100	100	100	
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas layanan Puskesmas dan Labkesda	IndeksKepuasan Masyarakat	84	85	86	87	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai sakiP	B	BB	BB	A	

2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam DPA melaksanakan 5 program, 21 kegiatan dan 584 sub kegiatan.

Tabel Target dan Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

	Program	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja 2023	Satuan
	1	2	3	4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	PersentaseFasyankes Yang Terakreditasi		100	
		KegiatanPenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	50	%
		Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang dibangun	0	unit
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah gedung fasilitas kesehatan yang dibangun	1	unit
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	1	unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	unit
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	6	jenis
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	208	unit
		Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	paket
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	6	unit
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	171	unit
		KegiatanPenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penerima Layanan Dasar SPM Bidang Kesehatan	100	%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4594	orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4594	orang
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4374	orang
		PengelolaanPelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19122	orang

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	47885	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	185056	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19859	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	54962	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	5736	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	421	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita TBC yang mendapat pelayanan sesuai standar	503	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6113	orang
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18	dokumen
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1125	dokumen
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sesuai standar	0	orang
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	135	dokumen
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	360	dokumen
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50000	dokumen
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang didistribusikan	1	Paket

			PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	20	dokumen
			OperasionalPelayananRumahSakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	dokumen
			OperasionalPelayananPuskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18	dokumen
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	dokumen
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	Puskesmas
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	36	dokumen
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Orang
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20	dokumen
			PengelolaanSistemInformasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Dinas Kesehatan)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	18	unit
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota memiliki izin yang masih berlaku	100	%
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	20	unit
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	Puskesmas
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dokumen
2	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		75	%
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik	85	%
			Pengendalian perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perijinan praktek tenaga kesehatan	250	dokumen
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	dokumen
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan dan pembinaan teknis tenaga kesehatan	75	%

			Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	274	orang
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	85	%
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	orang
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar	Persentase Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin	35	%
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan ijin	1	sarana
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50	dokumen
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	45	sarana
			Fasilitas pemenuhan komitmen izin apotek, Toko Obat, toko Alat Kesehatan dan optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi komitmen izin.	9	sarana
			Pemberian sertifikat sarana Produksi Alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian sertifikat sarana Produksi Alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100	%
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat sarana Produksi Alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat sarana Produksi Alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	dokumen
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	dokumen

			Penerbitan sertifikat Produksi pangan Industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untu produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi pangan Industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untu produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi	73	%
			Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat Produksi pangan Industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untu produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat Produksi pangan Industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untu produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	dokumen
			Penebitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah makam/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM).	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah makam/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi	50	%
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah makam/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM).	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah makam/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga	70	sarana
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70	unit
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1	dokumen
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		PersentasePosyandu Aktif		50	%
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang menganggarkan pendanaan untu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	90	%
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dokumen
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup bersih dan sehat (Puskesmas)	50	%
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu yang meningkat stratanya (puskesmas)	10	%

			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	dokumen
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentasecapaian penunjang perangkat Daerah		100	%
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8	dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	1	dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1	dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	1	dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1	Laporan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahDokumen Hasil Laporan MONEV	4	Laporan
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	100	%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	589	asn
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3000	dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlahlaporankeuanganakhir tahun yang disusun	1	Laporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	13	Laporan
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100	%
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	16	dokumen
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelaksanaan sub kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang di adakan	122	paket
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil evaluasi penilaian kinerja Kepegawaian	4	dokumen
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21	Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3	Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan	1	Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18	Laporan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%
			Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4	unit
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12	Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Laporan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2	unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	113	unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2	unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	12	unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	1	unit

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup sebagai tujuan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN TERHADAOP TARGET AKHIR RENSTRA (Bab III, 3.1)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kasus/ hasil	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
				S/D TW IV	S/D TW IV	S/D TW IIV	
1	Angka Harapan Hidup		70,74		73,13	103,37%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	194	7 Kasus	163,39	115,77%	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,3	29 bayi	6,76	145,04%	Sangat Tinggi
		Prevalensi Balita Stunting	12,4	406 balita	3,84	169%	Sangat Tinggi
		Insidensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	180		280,55	44,16%	Sangat Rendah
		Insidensi HIV Per 1000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,18		0,39	-16,66%	Sangat Rendah
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat di bidang kesehatan	Indeks Pencapaian SPM	100		92,12	92,12%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas layanan puskesmas dan Labkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat	84		85,37	101,63%	Sangat Tinggi

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam RPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026 mengampu sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran RPD	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,74 tahun	73,13 tahun	103,37%
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84	85,37	101,63%

1. Angka Harapan Lama Hidup

Target Angka Lama Harapan Hidup pada tahun 2023 adalah 70,74 tahun, realisasi 73,13 tahun dengan capaian 103,37%. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Hidup penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan 2,15 tahun dibandingkan data tahun 2022 yang mencapai 70,98 tahun. Peningkatan ini merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir.



Peningkatan angka harapan lama hidup penduduk dipengaruhi keberhasilan pembangunan diberbagai sektor, baik sektor kesehatan maupun sektor kesehatan.

Pada pembangunan sektor kesehatan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah :

- 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes.

2. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar secara bertahap, termasuk upaya pemeliharaan untuk memperpanjang masa pakai dari sarana, prasarana dan alat kesehatan.
3. Penyediaan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang memenuhi standar pada setiap siklus kehidupan, di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Pemenuhan mutu layanan dalam bentuk akreditasi rumah sakit, akreditasi Puskesmas maupun akreditasi laboratorium kesehatan daerah
5. Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui pemberian bantuan pembayaran iuran kepesertaan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan melalui berbagai pelatihan teknis maupun pembinaan manajerial dan pengangkatan tenaga kontrak daerah.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui berbagai Pembinaan dan penyediaan layanan di UKBM seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Kelas Ibu, Posyandu Remaja, Pos UKK, dan Posbindu PTM.
8. Pemberian rekomendasi perizinan pendirian, pengawasan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. berupa rumah sakit, klinik dan praktik tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan tradisional
9. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman.

Angka Harapan Lama Hidup penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 lebih rendah 0,41 tahun dari angka Harapan Lama Hidup penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 73,54 tahun dan lebih rendah 0,8 tahun dari Angka Harapan Lama Hidup Nasional yang mencapai 73,93 tahun.

Kondisi ini menunjukkan Angka Harapan Lama Hidup penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum optimal, hal ini disebabkan:

- a. Masih terdapat kematian bayi (kelompok umur 0 - 11 bulan) sebanyak 29 bayi dengan nilai realisasi 6,76% dan capaian 145,04%. Sedangkan target pada tahun 2023 untuk Angka kematian Bayi (AKB) adalah 12,3/1.000 KH (kelahiran hidup). Berdasarkan data di lapangan angka

kelahiran hidup 4.284 jiwa. Adapun jumlah dan penyebab kematian bayi terdiri dari 6 kasus bayi lahir cacat kongenital, 6 kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 2 kasus Asfiksia, 6 kasus Prematur, dan 9 kasus lain - lain.

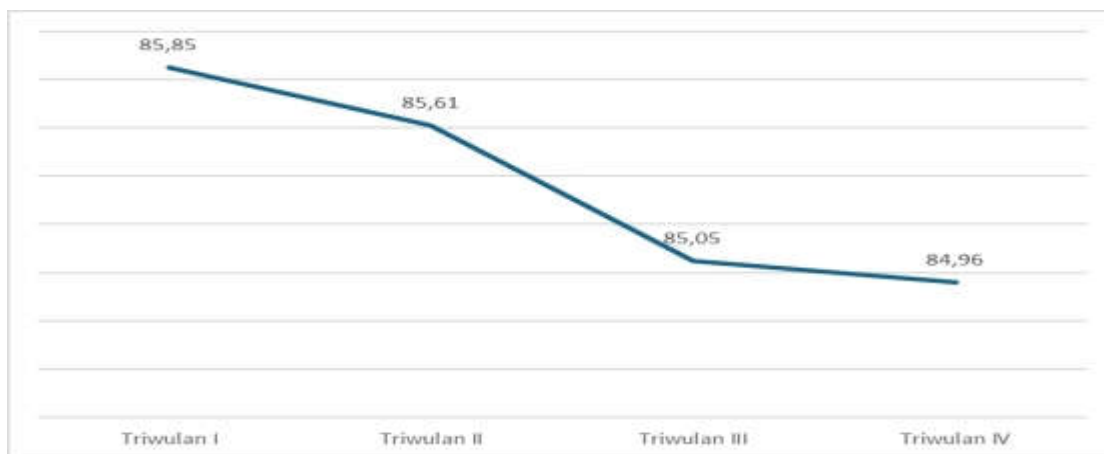
- b. Masih terdapat kematian ibu pada tahun 2023 yang mencapai 7 kasus. Target Angka kematian Ibu (AKI) tahun 2023 adalah 194/100.000 KH (kelahiran hidup). Berdasarkan data di lapangan angka kelahiran hidup 4.284 jiwa. Angka realisasi di kabupaten kotawaringin barat cenderung masih relatif bagus di bandingkan target yang ada. Adapun jumlah dan penyebab kematian Ibu terdiri dari 1 kasus akibat terlambat rujukan ke Fasilitas terdekat, 6 kasus hipertensi dalam kehamilan yang mengarah ke Pre-Eklamsia menyebabkan terjadinya Eklamsia.
- c. Kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis terdapat 29 kasus terdiri dari 26 orang kasus TBC dan 2 orang akibat kasus Resistant Obat (RO). Penyebab kematian pada kasus TBC disebabkan oleh banyak faktor dan komplikasi seperti hemoptisis, syok septik, gagal napas, pengobatan terputus akibat memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya. Target pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis 100% sasaran 5.030 orang dengan capaian orang yang dilayani 6.534 orang atau 130,08%. Artinya dari orang yang terduga dan mendapatkan diagnosa TBC langsung mendapatkan pengobatan sesuai standar. Ditambah dengan adanya 2 kematian terkonfirmasi pada kasus penyakit Demam Berdarah yang merupakan penyakit muncul disaat musim curah hujan yang tinggi di kabupaten kotawaringin barat. Serta data kematian 1 kasus terkonfirmasi akibat penyakit diare.
- d. Kematian akibat penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus tidak ada yang berasal dari faktor penyakit tersebut melainkan dari Kasus TBC, Kasus HIV dimana penderitanya memiliki penyakit penyerta seperti HIV dan Diabetes Melitus. Kematian pada penderita hipertensi dan diabetes melitus disebabkan karena komplikasi penyakit penyerta seperti gagal jantung dan gangguan pembuluh darah. Target untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% sasaran 54.962 orang dengan capaian orang yang dilayani sebanyak 39.391 orang atau 71,67% sedangkan target untuk pelayanan kesehatan orang dengan diabetes melitus 100% dengan

sasaran 5.736 orang dengan capaian 8.937 orang atau 155,81%. Kendala dalam pelaksanaan SPM-BK pada penderita hipertensi di Puskesmas yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang kurang terlatih, pencatatan dan pengawasan tidak dilakukan secara berkala, kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral, jumlah SDM yang kurang, penjangkauan sasaran belum optimal, dan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang.

- e. Penyebab lain adalah masih terdapat kasus balita dengan gizi buruk, Penderita penyakit menular seperti TB, HIV- AIDS dan DBD, Penderita penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Melitus dan Jantung.

2. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) .

Target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 adalah 84, realisasi rata-rata di triwulan I, II, III dan IV 85,37 dengan capaian 101,63%.



Upaya yang dilakukan dalam memberikan atau meningkatkan kepuasan pelanggan/masyarakat di Puskesmas dan labkesda hingga mampu memenuhi target adalah :

- a. Meningkatkan sarana prasarana dan alat kesehatan melalui pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan
- b. Meningkatkan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan, monitoring dan pembinaan
- c. Petugas berperilaku sopan dan ramah dalam memberikana layanan kepada pelanggan
- d. Meninjau dan melakukan perbaikan atas SOP dan alur pelayanan yang

- memerlukan perubahan
- e. Membuat media cetak dan elektronik terkait berbagai informasi yang perlu diketahui pelanggan antara lain poster dan video alur pelayanan, banner retribusi puskesmas dan labkesda, banner jenis layanan yang diberikan
 - f. Melakukan edukasi terkait waktu pelayanan melalui media audiovisual terintegrasi dengan upaya promosi kesehatan

<div> <div></div> <div> Nilai Unsur Pelayanan triwulan VI (Empat) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat </div> </div>									
	U3	U8	U4	U5	U1	U2	U7	U6	U9
IKM per unsur (Nilai Rata-rata)	3,15	3,34	3,37	3,38	3,40	3,41	3,44	3,46	3,80
IKM per unsur (Nilai Konvensi)	78.75	83,50	84,25	84.50	85,00	85.25	86.00	86,50	95.00
Kategori	B	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	84.961 (A atau Sangat Baik)								



Berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Unsur Kecepatan Pelayanan dengan nilai 78.75, hal ini terkait dengan waktu tunggu/penyelesaian suatu pelayanan yang diterima oleh konsumen/pelanggan yang dinilai Baik dan cepat.
2. Unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai 80.00 mendapatkan mutu pelayanan dengan kategori Sangat Baik, dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan kepada masyarakat, baik persyaratan teknis maupun administratif dibuat dengan mudah dan terbuka.
3. Nilai pada Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan nilai terendah yaitu 83.50 dengan katogori mutu pelayanan adalah A (sangat baik), Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan presentasinya ini perlu di pertahankan atau ditingkatkan.
4. Unsur pelayanan Kewajaran Biaya mendapatkan nilai 84.25 mendapatkan mutu pelayanan dengan kategori Sangat Baik, hal ini masyarakat sudah memahami tentang tarif/retribusi yang sudah disampaikan ke petugas pemberi layanan kepada penerima layanan.
5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan dengan nilai 84.50, ini mendapatkan mutu pelayanan dengan kategori Sangat baik, Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Unsur Kemudahan Prosedur dengan nilai 85.25 mendapatkan mutu pelayanan dengan kategori Sangat Baik, Hal ini terkait dengan adanya kemudahan prosedur yang digunakan masyarakat untuk setiap pelayanan yang diberikan.
7. Unsur Perilaku Petugas dengan nilai 86.00, Unsur pelayanan Perilaku Petugas sudah tergolong sangat baik dan harus tetap dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Perilaku Petugas yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan terkait kesopanan, keramahan dan komunikasi yang baik dari petugas/pelaksana pada saat berhadapan atau menangani konsumen/pelanggan.
8. Unsur Kompetensi Petugas dengan nilai 86.50 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Unsur pelayanan Kompetensi Petugas dinilai sudah baik dan harus tetap dipertahankan bila perlu ditingkatkan lagi.
9. Nilai pada Unsur Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana ini dengan nilai 90.00, ini merupakan nilai unsur yang tertinggi, dengan mutu

kategori Sangat Baik, Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana dinilai paling tertinggi dari unsur yang lainnya, oleh sebab itu sarana dan prasarana di Unit Pelayanan perlu di jaga dan dipelihara dengan baik. Belum tercapainya target rata-rata survey kepuasan masyarakat disebabkan oleh :

- a. Responden belum memiliki pemahaman yang sama terhadap standar waktu pelayanan yang sangat bergantung pada kompleksitas penyakit/ keluhan pasien.
- b. Pemenuhan kompetensi petugas, sarana dan prasarana belum merata diseluruh puskesmas.

Selain sasaran di RPD Kabupaten Kotawaringin barat tahun 2023-2025, Dinas Kesehatan juga mempunyai sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

1.ANGKA KEMATIAN IBU (AKI).

Masih terdapat kematian ibu pada tahun 2023 yang mencapai 7 kasus. Target Angka kematian Ibu (AKI) tahun 2023 adalah 194/100.000 KH (kelahiran hidup) dengan nilai realisasi 163,39/100.000 KH dan capaian 115,77%. Berdasarkan data di lapangan angka kelahiran hidup 4.284 jiwa. Angka realisasi di kabupaten kotawaringin barat cenderung masih relatif bagus di bandingkan target yang ada. Adapun jumlah dan penyebab kematian Ibu terdiri dari 1 kasus akibat terlambat rujukan ke Fasilitas terdekat, 6 kasus hipertensi dalam kehamilan yang mengarah ke Pre-Eklamsia menyebabkan terjadinya Eklamsia.

Upaya yang dilakukan untuk keberhasilan menekan Angka kematian Ibu (AKI) yaitu petugas kesehatan meningkatkan skill dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Mengupayakan dan meningkatkan sarana dan prasarana di lapangan untuk melakukan pelayanan sesuai standar serta berkolaborasi aktif dengan kader, masyarakat serta lintas sektor terkait.

Namun hal tersebut masih belum optimal hal ini disebabkan karena tingginya kasus hipertensi pada ibu hamil. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mmHg. Diperkirakan sekitar 8-10% ibu hamil di seluruh dunia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu, tetapi bisa juga muncul lebih awal.

Untuk menekan angka kematian ibu yang disebabkan oleh kasus hipertensi, pada usia produktif/remaja untuk perempuan harus sudah terskrining untuk deteksi hipertensi lebih dini. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi yang harus terus mendapat pemantauan dari dokter. Oleh karena itu, penting bagi setiap ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter kandungan sesuai jadwal. Untuk menangani kondisi hipertensi dalam kehamilan, dokter akan memberikan obat penurun tekanan darah. Obat yang dipilih dokter umumnya sudah disesuaikan dengan kondisi kehamilan agar tidak berdampak pada janin. Saat mendapatkan pengobatan hipertensi dari dokter, ingatlah untuk mengonsumsi obat tersebut sesuai dosis dan petunjuk dokter. Jangan berhenti mengonsumsi atau mengganti dosis tanpa pengawasan dari dokter. Bumil juga dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan mengelola stres dengan baik. Selain itu, hindari pula merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Agar berbagai dampak hipertensi dalam kehamilan dapat dicegah, penting bagi Bumil untuk rutin menjalani pemeriksaan ke dokter. Dengan begitu kondisi kesehatan Bumil dan janin bisa terus terpantau. Sehingga untuk menekan angka kematian ibu yang disebabkan oleh kasus hipertensi, pada usia produktif/remaja untuk perempuan harus sudah terskrining untuk deteksi hipertensi lebih dini. Selain yang telah disebutkan, ada pula beberapa faktor lain yang turut berperan menjadi penyebab kematian ibu hamil, antar lain :

- a. Kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan masih kurang untuk penanganan kegawatdaruratan pada proses persalinan.
- b. Ketersediaan alat medis dan non medis yang belum memadai.
- c. Sarana transportasi bagi tenaga kesehatan di des masih terbatas.
- d. Transportasi rujukan dari desa ke rumah sakit rujukan kurang standar.

Faktor keberhasilan yang dilakukan yaitu petugas kesehatan meningkatkan skill dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Mengupayakan dan meningkatkan sarana dan prasarana di lapangan untuk melakukan pelayanan sesuai standar serta berkolaborasi aktif dengan kader, masyarakat serta lintas sektor terkait.

2.ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB).

Masih terdapat kematian bayi (kelompok umur 0 - 11 bulan) sebanyak 29 bayi dengan nilai realisasi 6,76/1.000 KH dan capaian 145,04%. Sedangkan

target pada tahun 2023 untuk Angka kematian Bayi (AKB) adalah 12,3/1.000 KH (kelahiran hidup). Berdasarkan data di lapangan angka kelahiran hidup 4.284 jiwa. Angka realisasi di kabupaten kotawaringin barat masih relatif bagus di bandingkan target yang ada. Adapun jumlah dan penyebab kematian bayi terdiri dari 6 kasus bayi lahir cacat kongenital, 6 kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 2 kasus Asfiksia, 6 kasus Prematur, dan 9 kasus lain - lain.

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan meningkatnya angka kematian bayi disebabkan oleh meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan untuk penanganan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir, adanya kunjungan rumah pada bayi baru lahir dan kerja sama dengan kader kesehatan yang ada di desa, serta dilaksanakannya peningkatan SDM tenaga kesehatan untuk deteksi dini bayi baru lahir.

Keberhasilan capaian Angka kematian Bayi dibawah target tersebut disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan untuk penanganan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir.
- b. Peralatan medis penanganan kegawatdaruratan bagi bayi baru lahir sudah memadai meskipun belum terstandar.
- c. Dukungan dari kader pendamping ibu hamil yang ada di desa.

3.PREVALENSI BALITA STUNTING.

Prevalensi Stunting pada Balita dengan target pada tahun 2023 adalah 12,4%, realisasi 3,84% dengan capaian 169%. Balita yang diukur sebanyak 10.652 balita dengan kasus stunting 406 balita. Penyebab terjadinya Stunting di nilai dari 1000 hari kehidupan pertama janin dalam tubuh ibu dengan pengaruh faktor genetik, gizi ibu serta lingkungan (konsumsi makanan sehat, kebersihan atau sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih). keberhasilan capaian prevalensi stunting tersebut dikarenakan adanya kunjungan rumah bagi balita yang tidak berkunjung ke posyandu dan pelatihan bagi tenaga bidan desa untuk *entry* e-PPGBM hasil pengukuran di posyandu serta peningkatan kerja sama dengan kader kesehatan dan peningkatan SDM kader kesehatan.

Sebagai salah satu masalah kesehatan nasional, stunting perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, hingga tingkat keluarga. Dengan kondisi demikian bahwa terdapat 3 upaya yang akan dilakukan untuk mencegah stunting yang akan

dimulai pada periode pra kehamilan wanita. Untuk itu, intervensi akan difokuskan kepada wanita sebelum melahirkan sebagai upaya pencegahan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus stunting adalah :

1. Adanya dukungan dari kader Posyandu di setiap desa/ kelurahan.
2. Kapasitas tenaga gizi puskesmas sudah memadai sehingga capaian entri ePPGBM diatas 60%.
3. Pemberian makanan tambahan (PMT) dengan tinggi protein pada balita yang bermasalah gizi terutama gizi buruk juga merupakan salah satu program yang berjalan dalam rangka intervensi kasus stunting.
4. Tersedianya alat ukur antropometri di setiap posyandu/Desa untuk melakukan pengukuran balita secara rutin di posyandu.

4.INSIDENSI TUBERKOLOSIS

Insidensi Tuberkulosis per100.000 penduduk. Insidens Tuberkulosis (ITB) adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang sama kemudian dikali 100.000.

Target Insidensi TBC di kabupaten kotawaringin barat tahun 2023 adalah 180/100.000 penduduk, realisasi 287,45/100.000 penduduk dan capaian 40,30%. Jumlah penduduk kabupaten kotawaringin barat sebanyak 280.390 jiwa. Kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis terdapat 29 kasus terdiri dari 26 orang kasus TBC dan 2 orang akibat kasus Resistant Obat (RO). Penyebab kematian pada kasus TBC disebabkan oleh banyak faktor dan komplikasi seperti hemoptisis, syok septik, gagal napas, pengobatan terputus akibat memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya. Target pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis 100% sasaran 5.030 orang dengan capaian orang yang dilayani 6.534 orang atau 130,08%. Artinya dari orang yang terduga dan mendapatkan diagnosa TBC langsung mendapatkan pengobatan sesuai standar.

Faktor penyebab meningkatnya angka realisasi didapatkan karena pengelola TB Kabupaten melakukan upaya dengan meningkatkan pemeriksaan secara dini dengan metode skrining. Insidensi TBC tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan masifnya kegiatan AFC (Active Case Finding)/penemuan kasus

aktif tuberkulosis yang dilakukan seluruh puskesmas untuk menemukan kasus baru dan kambuh Tuberkulosis di tempat - tempat yang sangat beresiko tinggi terjadinya penularan seperti LAPAS, PONPES dan di tempat yang memiliki resiko tinggi lainnya. Di tahun 2024 kegiatan ACF akan lebih masif lagi dengan sasaran perkantoran dan karyawan pabrik.

5.Insidensi HIV

Insidensi HIV Per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Insidensi HIV/AIDS dengan target pada tahun 2023 adalah 0,18/100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, realisasi 0,39 /100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV dengan capaian -16,66%. Angka ini dari kasus baru usia > 15 tahun sebanyak 80 orang dari kasus kumulatif sebanyak 276 orang. Jumlah penduduk > 15 tahun sebanyak 204.639 jiwa.

Faktor penyebab meningkatnya hasil realisasi HIV dilapangan dikarenakan sebagian populasi kunci (penasun, pekerja seks dan waria) menunjukkan infeksi HIV baru pada populasi usia 15 tahun ke atas secara konsisten mengalami penurunan dari waktu ke waktu, tetapi tidak begitu halnya pada populasi lelaki seks dengan lelaki (LSL) dan perempuan berisiko rendah (pasangan populasi kunci). Pada kedua kelompok ini, angka infeksi HIV baru justru meningkat.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan HIV/AIDS dikarenakan peran lintas sektor dan penjangkau untuk melakukan kegiatan atau penjangkauan pada populasi berisiko, ketersediaan logistik yang memadai juga mendukung dalam pencapaian program. Meningkatnya angka realisasi, didapatkan karena pengelola HIV Kabupaten meningkatkan pemeriksaan secara dini dengan metode skrining. Insidensi HIV tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan masifnya kegiatan Skreening yang dilakukan seluruh puskesmas untuk menemukan kasus baru dan HIV Aktif di tempat - tempat yang sangat beresiko tinggi terjadinya penularan di tempat yang memiliki resiko tinggi lainnya.

6.Indeks Pencapaian Survei Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara

secara minimal. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah, Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Indikator Survei Pelayanan Minimal bidang Kesehatan terdiri dari 12 Indikator.

3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan SPM

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN 2023	Satuan	TERLAYANI (ORANG)	CAPAIAN
						(%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4.594	Orang	4.373	95,19%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4.594	Orang	4.144	90,20%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.374	Orang	4.058	92,78%
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.122	Orang	12.236	63,99%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	47.885	Orang	46.342	96,78%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan sesuai standar	185.056	Orang	161.964	87,52%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	19.859	Orang	19.380	97,59%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54.962	Orang	39.391	71,67%
9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.736	Orang	8.937	155,81%
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan	421	Orang	453	107,60%
11	Pelayanan kesehatan pada orang terduga Tuberkolosis (TB)	Jumlah penemuan kasus suspek terduga TBC	5.030	Orang	6.664	132,49%

12	Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV -AIDS	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV - AIDS yang diperiksa	6.113	Orang	7.883	128,95%
Total Nilai SPM						92,12%

Nilai indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan nilai 92,12%. Angka ini didapatkan karena di sistem pelaporan Aplikasi Bangda tidak boleh melaporkan hasil diatas nilai 100% jadi cukup memuat nilai 100% apabila terdapat hasil capaian diatas 100%.

Faktor penyebab nilai SPM tidak sesuai target perprogram adalah sebagai berikut :

- a. Tidak semua Ibu bersalin melahirkan di Fasilitas Kesehatan.
- b. Ibu hamil yang masuk masa persalinan belum semuanya terdata di fasilitas kesehatan.
- c. Kunjungan Bayi masih belum mencapai kunjungan sesuai terstandar (KN4)
- d. Untuk kegiatan kunjungan Bayi balita di posyandu/fasilitas kesehatan tidak memenuhi target sasaran dikarenakan kehadiran oleh balita yang masih mendapatkan pelayanan imunisasi dasar lengkap saja (0-9 bulan) sedangkan usia balita (0-4 tahun) itu sebagian besar tidak melakukan kunjungan ke posyandu secara rutin.
- e. Kegiatan program Lansia. Lemahnya pemanfaatan kohort lansia (e- kohort belum digunakan).
- f. Pencatatan dan pelaporan puskesmas masih secara manual.
- g. Program Penyakit Tidak menular (Hipertensi) disebabkan kurangnya koordinasi dengann jejaring wilayah kerja Puskesmas.

Upaya yang dilakukan untuk keberhasilan Nilai SPM adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan/Monitoring & evaluasi langsung dan tidak langsung ke fasilitas kesehatan seerta menjalin jejaring lintas sektor.
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan program.
3. Dukungan dari kader desa pendamping program terkait SPM.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat responden yang memberikan nilai persepsi kurang dari 4 untuk setiap unsur pelayanan dari 9 unsur penilaian yang dinilai, hal ini dikarenakan belum seluruh responden merasakan:
 - a. Persyaratan pelayanan sangat sesuai kebutuhan;
 - b. Prosedur pelayanan sangat mudah;
 - c. Waktu penyelesaian sangat cepat;
 - d. Kewajaran biaya pelayanan gratis;
 - e. Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan sangat sesuai;
 - f. Kemampuan petugas pelayanan sangat kompeten;
 - g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikelola dengan baik;
 - h. Sarana dan prasarana sangat baik.
2. Ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM Kesehatan yang kompeten di setiap unit pelayanan tidak merata, khususnya antar puskesmas;
3. Target yang ditetapkan terlalu ambisius atau nyaris sempurna, sesuatu yang hampir tidak mungkin diperoleh dari sebuah penilaian berdasarkan subjektivitas responden.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Terlaksananya kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan kesehatan di FKTP/Puskesmas dan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan analisa sebagai berikut:

Adanya dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke FKTP/ Puskesmas untuk membantu memberikan solusi pemecahan masalah yang dihadapi FKTP/Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat.

3.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	Indikator Kinerja	Target	Capaian
I	Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan kesehatan Kesehatan		
1	Angka Harapan Hidup	70,74	73,13
II	Tujuan Renstra : Meningkatnya Kualitas Kesehatan		
	1 Angka Harapan Hidup		73,13
III	Indikator Sasaran Renstra		
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan		
a	Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hiduop	194	115,77
b	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran hidup	12,3	145,04
c	Prevalensi Balita Stunting	12,4	169,03
d	Insidensi Tuberkulosis Per 100.000 penduduk	180	44,16
e	Insidensi HIV Per 1.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV	0,18	
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar masyarakat di bidang kesehatan	100	
	Indeks Pencapaian SPM		91,37
IV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
1	Persentase Puskesmas Yang terakreditasi	100	83,33
2	Persentase Fasyankes Yang Memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	65	72,2
3	Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	8,3	9,23
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkolosis	90	157,65
5	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	50	89,05
V	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan		
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	75	72
VI	Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman		
	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	95	95
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan		
	Persentase Posyandu Aktif	80	97,89
VIII	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota		
	Persentase Capaian Penunjang perangkat daerah	100	85,14
IX	Kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten / kota		
1	Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	72	72,2
2	Persentase Rumah Sakit (Kelas D) yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	0	0
3	Persentase Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memiliki sarana, prasarana dan alat yang memiliki sarana, prasaran dan alat kesehatan sesuai standar	0	0
4	Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	100	54,14
X	Kegiatan Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		
1	Indeks SPM Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	100	88
2	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	70	61,3
3	Indeks SPM Kesehatan Bidang	100	93,33

4	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Desa/Kelurahan Sehat	88	86,17
5	Persentase Orang dengan HIV baru yang ditemukan mendapatkan pengobatan ART	90	93,89
6	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12 -24 Bulan	77	
7	Persentase Pembayaran Iuran Premi PBI APBD dalam Pemenuhan UHC	100	100
8	Persentase Penyehat Tradisional memiliki surat terdaftar penyehat tradisional	40	57
9	Jumlah FKTP yang memenuhi syarat survey akreditasi	18	18
10	Jumlah Rumah Sakit Kelas D yang memenuhi syarat survey akreditasi	1	0
XI	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Jumlah Fasyankes yang menyelenggarakan sistem Informasi kesehatan	18	18
XII	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 1 Persentase rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota memiliki izin yang masih berlaku 2 Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan pengukuran indikator	100 100	95 100
XIII	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota Persentase Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota berpraktik yang memiliki izin yang masih berlaku	85	82
XIV	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/ kota Jumlah dokumen pemanfaatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	1	1
XV	Kegiatan Pengembangan Mutu dan pengembangan Mutu DAN PENINGKATAN Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat kabupaten/ kota Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti [pendidikan / pelatihan / uji kompetensi	200	219
XVI	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko pemberian izin Apotek, Toko obat, Tokom alat kesehatan dan optikal, usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Apotek, Toko Obat, dan USAHA Mikro obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100	70
	Persentase optikal yang memiliki izin	60	100
XVII	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai izin produksi pangan industri Rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Produksi Pangan olahan tertentu industri rumah tangga memiliki sertifikat produksi dan Nomor P-IRT	95	85
XVIII	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa boga, Rumah makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi	65	71
XIX	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase Makanan Jajanan dan Sentra	-	0

	Makanan Jajanan yang diterbitkan stiker		
XX	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Produk makanan minuman Produksi Industri Rumah Tangga yg memenuhi syarat	98	85
XXI	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Desa yang menerapkan dan menganggarkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	88	100
XXII	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	81	80
XXIII	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Posyandu yang meningkat stratanya (tingkat perkembangan)	5	5
XXIV	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13	13
XXV	Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2738	2485
XXVI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	18	18
XXVII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	10	10
XXVIII	Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	23	23
XXIX	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	23	23
XXX	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12
XXXI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa pemeliharaan barang milik	133	120

	daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		
XXXII	Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15	15

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Realisasi Kinerja TW III	Realisasi Kinerja s/d Tw III	CAPAIAN % s/d TW III	Realisasi Kinerja TW IV	Realisasi Kinerja s/d Tw IV	CAPAIAN % s/d TW IV	Tim kerja Farmalkes dan PKRT telah menyiapkan acuan untuk pemilihan produk alak kesehatan yang telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan minimal 40 % sehingga memudahkan untuk pencarian produk yang kita inginkan			
											Hambatan	Solusi	Upaya Yang telah dilakukan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Kesehatan													
1	Program pemenuhan pelayanan UKP & UKM	Persentase Fasyankes (Puskesmas) yang Terakreditasi	100	%	5,56%	5,56%	5,56%	77,78 %	83,33 %	83,33%	Anggaran utk survey akreditasi hanya tersedia untuk 15 Puskesmas	Menganggarkan biaya survey akreditasi Puskesmas di Tahun 2024	Membentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB), melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi termasuk LIPA	
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai standar	100	%	72,2	72,2	72,20%	72,2	72,20 %	72,20%	Belum tercapainya pesentase kelengkapan alat kesehatan pada Puskesmas menjadi faktor rendahnya kumulatif SPA luang dari 100%	Memenuhi kebutuhan SPA di masing - masing Puskesmas sesuai dengan PMK 43 TH 2019	Memenuhi kebutuhan SPA di masing-masing Puskesmas secara bertahap	
		Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	100	%	-	-	-	-	54,14 %	54,14%	Terdapat bbrp jenis obat esensial yg merupakan jenis obat program kewenangan kementerian kesehatan, dan kekosongan jenis obat di penyedia (misal : obat lambung)	Pengadaan dari JKN oleh Puskesmas	Pengadaan obat dan koordinasi dengan penyedia. mendorong penggunaan obat dgn indikasi yang sama (misal : antasida sirup diganti ranitidin tablet, amoxicilin 250 mg diganti amoxicilin 500 mg 1/2 tablet)	
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	Unit	0,30	0,30	30%	0,7	1	100%	pelaksanaan kontrak di mulai pada triwulan III		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
2	Pembangunan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	1	Unit	1	1,00	100%	0	1	100%				

3	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	Unit	6	6,00	66,67%	3	9	100%	waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang panjang		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	8	8,00	80,00%	2	10	100%	waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang panjang		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	0	0,40	40,00%	0,6	1	60%	pelaksanaan kontrak di mulai pada triwulan III			
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Unit	10	10,00	83,33%	2	12	100%	waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang panjang		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	1	1,00	100,00%	0	1	100%				
8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	1	1,00	100,00%	1	1	100%				
9	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22	jenis	22	22,00	100,00%	0	22	100%				

10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan Puskesmas yang diadakan	1100	jenis	365	365	33,18%	735	1.100	100%	Belum ditemukan hambatan yg berarti , hanya terjadi efiensi dari pemelihan produk dannegosiasi ongkos kirim	Mempesiapkan sejak dini pencarian data alkes yg kandungan TKDN nya sesuai	Tim kerja Farmalkes dan PKRT telah menyiapkan acuan untuk pemilihan produk alat kesehatan yang telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan minimal 40 % sehingga memudahkan untuk pencarian produk alat kesehatan	
11	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	10	Unit	9	9,00	90,00%	1	10	100%				
12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan dikalibrasi	830	Unit	0	0	0	780	780	94%	Peralatan yang kita usulkan untuk dilakukan uji kalibrasi darl penyedia jasa dalam hal ini PBFK banjarbaru ,a da beberapa alat yang belum memiliki alat parameter uji sehingga alat yang akan dikalibrasi tidak semua bisa dilakukan .	Tim kerja sejak awal akan mempersiapkan tim untuk mencari BPFK mana yang lebih lengkap untuk bisa melakukan pengujian/kalibrasi	Tim kerja akan mencari referensi sebanyak mungkin tempat pengujian kalibrasi yang lebih lengkap parameter ujinya	
B	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Penerima layanan Dasar SPM Bidang P2P	100	Indeks		88	88,00%		93,33	93,33%				
		Indeks Penerima layanan Dasar SPM Bidang Kesmas	100	Indeks	-	-	-	-	88	88,00%				
		Indeks Keluarga Sehat	0,3	Indeks		-	-		0,23	76,67%				
		Persentase Desa Sehat	70	%	-	-	-	-	81	86,17%				

		AIDS Yang Mendapatkan Pengobatan ARV	90	%		74	74,00%		84,50	93,89%		Follow up dan pemantauan jadwal pengobatan ARV pada ODHA baru yang memenuhi syarat pengobatan	Follow up dan pemantauan jadwal pengobatan ARV pada ODHA baru yang memenuhi syarat pengobatan	
		an	85	%	-	71,3	71,30%	-	85,00	100,00%				
		memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	166	orang	32	165	99,40%	42	207	124,70%	Penyehat Tradisional (Hattra) yang telah didata oleh pengelola program Yankestrad Puskesmas masih banyak yang belum mengetahui bahwa mereka wajib memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan STPT		- Tim Kerja Kesehatan Tradisional Kabupaten bersama-sama dengan pengelola program Yankestrad di Puskesmas melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan terkait Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada Penyehat Tradisional baik Penyehat Tradisional perorangan maupun Penyehat Tradisional berkelompok. - Tim Kerja Kestrad Kabupaten dan Pengelola Program Yankestrad di Puskesmas memfasilitasi Hattra untuk mendapatkan STPT	
		Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu memiliki Jaminan Kesehatan	100	%	100	100	99,00%	100	100	100,00%				
		Jumlah FKTP yang memenuhi syarat Survey Akreditasi	18	Unit	18	18	100,00%	18	18	100,00%				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.594	Bumil	984	3.130	68,13%	1.107	4.237	92,23%	ibu Hamil masih belum Masuk Masa Persalinan	Melakukan Pendataan Ibu Hamil Oleh Puskesmas	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.594	Bulin	972	3.083	67,11%	1.086	4.169	90,75%	tidak semua ibu bersalin dilakukan Faskes	Melakukan koordinasi Linsek dan memperbaiki sarana dan Prasarana di Poskesdes	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	

3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.374	Bayi Baru Lahir	925	2.886	65,98%	1961	3.896	89,07%	kunjungan Bayi masih belum mencapai Kunjungan sesuai Terstandar (KN4)	Meningkatkan Koordinasi Linsek	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19.122	Balita	10.070	19.122	100,00 %	890	12.236	63,99%	yang Datang ke Faskes hanya Balita yang IMMUNISASI yang sehat Tidak berkunjung secara AKTIF	Meningkatkan Koordinasi Linsek	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	47.885	Orang	8.874	21.865	45,66%	7524	46.342	96,78%			Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	185.056	Orang	68.727	132.473	71,59%	29487	161.960	87,52%	Kegiatan Posbindu Mobile dan Institusi belum dilaksanakan maksimal		Monev ke Pengelola Program Puskesmas	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.859	Orang	3.827	14.394	72,48%		19.380	97,59%	1. Lemahnya pemanfaatan kohor Lansia (eKohor belum digunakan), 2. Rotasi pengelola program di puskesmas yang cukup tinggi, 3. Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas masih secara manual, 4. Integrasi Data dalam Satu Sehat masih dalam proses	Meningkatkan Skill Pengelola Lansia baik pencatatan dan Pelaporan Program	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pendeita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54.962	Orang	18.666	31.014	56,43%	8377	39.391	71,67%	Kurangnya koordinasi dengan jejaring Wilker Puskesmas		Monev ke Pengelola Program Puskesmas	

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5.736	Orang	1.884	5.736	100,00 %	3201	8.937	155,81 %			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	421	Orang	18	441	104,75 %	10	451	107,13 %			Monev ke pengelola program puskesmas dan menjalin jejaring lintas sektor
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	503	Orang	194	605	120,28 %	188	793	157,65 %			Monev ke pengelola program puskesmas dan menjalin jejaring lintas sektor
		Jumlah penemuan kasus suspek terduga TBC	5030	Orang	2071	4.206	83,62%	1.215	6.543	130,08 %			Monev ke pengelola program puskesmas dan menjalin jejaring lintas sektor
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6133	Orang	2565	5.700	92,94%	2183	7.883	128,53 %			
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV-AIDS	Jumlah Kasus HIV-AIDS yang di obati (ODHA ON ART)	338	Orang	107	107	31,66%	194	301	89,05%			Peningkatan Layanan PDP (Perawatan, dukungan dan pengobatan) 4 layanan, calon pdp baru 3 layanan masih menunggu aktivasi. Penyediaan Pendamping ODHA (tetapi masih terbatas)
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5	Dokumen	5	5	100,00 %	5	5	100,00 %			
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4	Dokumen	4	4	100%	4	4	100%			Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	5	5	100%	5	5	100%			Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lingkungan melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan Sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas

16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	Dokumen	0	1	50%	1	2	100%			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	Dokumen	1	3	75%	1	4	100%			Tim kerja Pelayanan Kesehatan Tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat secara rutin per triwulan melakukan koordinasi dengan pengelola program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas	Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Puskesmas disampaikan setiap triwulan
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	Dokumen	2	2	100%	0	2	100%	pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan III			Laporan Kegiatan Pelayanan Surveilans kesehatan tahun 2023
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1125	Orang	15	487	43%	10	497	44,2%	Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ	1. Meningkatkan pendekatan lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada keluarga 2. Membentuk kader kesehatan jiwa tingkat desa/kelurahan	Edukasi kepada keluarga dan advokasi lintas sektor terkait.	
20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%			Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal	
21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	243	Dokumen	60	185	76%	58	243	100%				
22	pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	Spesimen	13	13	100%	7	21	105%			Tim surveilans dan imunisasi berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit dalam penemuan kasus dan penambilan spesimen sesuai standar	
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	3	6	50%	9	12	100%			membuat pertanggungjawaban tagihan secara berkala setiap bulannya	SPJ dibuat setiap bulansesuai dengan tagian BPJS Kesehatan

24	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%				
25	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	Dokumen	3	6	50%	3	6	100%				
26	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	3	6	50%	12	12	100%			melakukan pertanggungjawaban kegiatan secara berkala setiap bulannya	SPJ di lakukan setiap bulan oleh puskesmas untuk operasional puskesmas
27	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%			pembuatan dokumen dana Hibah PMI untuk bisa di terima oleh PMI sebagai anggaran operasional	Penyerapan anggaran dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan
28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	Fasilitas	1	1	6%	15	15	83%	Anggaran tersedia hanya untuk 15 Puskesmas	Direncanakan terakreditasi di tahun 2024	Melakukan penambahan anggaran dalam anggaran perubahan	Upaya penambahan sasaran survei akreditasi pada Anggaran perubahan didasarkan atas surat edaran Kemenkes bahwa terhitung 31 Desember fasyankes harus terakreditasi agab bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	18	Dokumen	3	10	56%	8	18	100%	Kekosongan bahan RDT untuk deteksi dini penyakit potensial KLB dan reagen pemeriksaan laboratorium rujukan	Pengajuan surat ke dikes provinsi permintaan RDT antigen,	Koordinasi dengan angaran pembelian RDT antigen	

30	pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120	Orang	32	107	89%	26	133	111%			Peningkatan dan penambahan Layanan PDP	
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	425	Orang	0	0	0%	203	203	47,80%	Pemeriksaan hanya berdasarkan gejala malaria saja, untuk sasaran pemeriksaan terbatas karena RDT malaria kosong	Pengadaan RDT dan bahan pemeriksaan malaria	Pengajuan permintaan RDT sesuai jumlah sasaran	
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan	100	%	-	-	-		100	100				
		Persentase laporan program yang menggunakan laporan elektronik berbasis web	70	%	-	-	-	100	100	100				
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20	Dokumen	5	15	75%	5	100	100				
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	1	100	100				
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	18	Alat	0	0	0	18	100	100				
D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki izin yang masih berlaku	100	%	-	-	-	-	95 %	95 %				
		Persentase Puskesmas melaksanakan Indeks Nasional Mutu Puskesmas	100	%					100	100				

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	20	Fasyankes	5	15	75%	19	19	95%	Masih terkendala dengan sistem pendaftaran di OSS RBA	Terus dilakukan pendampingan terhadap pemohon	Pembinaan, monitoring dan evaluasi ke fasyankes lainnya secara berkala	Dimohon untuk dapat menambah anggaran agar pelaksanaan pembinaan dapat memenuhi target
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah bidang PME diikuti	5	Bidang	0	0	0	5	5	100%			Melakukan koordinasi lintas bidang agar Peningkatan Mutu Fasyankes tetap berjalan sesuai target	Koordinasi berjalan dengan baik antar lintas bidang
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	Fasilitas	18	18	100%	18	18	100%			Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala baik melalui Luring dan Daring	Dilakukan Monev ke 18 Puskesmas
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti tahapan status BLUD	18	Puskesmas	15	15	83%	18	18	100%			Melakukan penilaian secara serentak melalui panitia kabupaten yang ditandai dengan SK Bupati	18 Puskesmas sudah dilakukan penilaian dan sudah di keluarkan Penetapan berupa SK Bupati
3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%			Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Fasyankes secara berkala	
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan kesehatan rujukan	20	Puskesmas	2	16	80%	20	20	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					#VALUE!							
		Predikat Kinerja					Rendah							

2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	75	%					72 %	72 %				
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga Kesehatan berpraktik memiliki izin yang masih berlaku	85	%		82%	82%		82 %					
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	Dokumen	7	7	100%	7	7	100%				
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	Dokumen	1	5	71,42%	7	7	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					82%							
		Predikat Kinerja					Tinggi							
B	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan	1	dokumen		1	100,00%							

1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	1	1	100%				
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	274	orang	272	272	99,27%	272	272	100%				
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	Dokumen	4	4	35%	6	10	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					99,27%							
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi							
C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan/pelatihan/uji kompetensi	50	Orang		196	196							
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	222	Orang	196	196	88%	219	219	100%				

		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					100%							
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi							
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar	100	%	100	100	100,00%			95 %				
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	48			48	100,00%							
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48	Dokumen	22	39	81,25%	9	48	100%	Tidak ada hambatan	mempertahankan kegiatan	Membuat jadwal kegiatan perbulan	
2	penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9	sarana	1	1	11,11%	5	6	66,66%	selama kegiatan dilaksanakan sudah tidak ditemukan lagi sarana yang belum berijin.	tidak di temukan lagi pelanggaran karena pemilik sudah sadar akan perlunya perizinan	menurunkan target pengawasan toko obat dan apotek yang tidak berizin	

	onal (UMOT)													
3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatari, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	45	sarana	6	28	62,22%	11	39	86,66%	Kegiatan dilakukan setelah ada pengajuan permohonan ijin sarana	tetap menunggu pengajuan dari pemilik baru	kerjasamanya dengan OSS DAN IAI untuk peningkatan pengajuan izin	
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					100,00%							
		Predikat Kinerja					Sangat Rendah							
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertntu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi	5	%		0	0%							

1	pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan n Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen	0	0	0%						
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga , Rumah makan / Restoran dan Depot Air MINUM (DAM) yang memiliki sertifikat laik Higiene sanitasi	50	%	0	0	0%						
3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan n Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Dokumen	0	0	0%						

		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					0							
		Predikat Kinerja					Sangat Rendah							
C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah diperiksa dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	101	Buah		86	85							
1	Pemeriksaan postmarket pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	101	sampel	56	78	77.22%	23	101	100%	Target pemeriksaan sampel telah tercapai	membuat daftar rencana sampel yang akan dilakukan pengujian tahun berikutnya	1. Membuat daftar sampel pangan yang diuji berdasarkan penetapan riskbased sampling 2. Membuat daftar nama sarana IRTP yang dikunjungi berdasarkan track record IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif)	45 sampel pangan yang diujikan dan 56 sarana IRTP yang telah dilakukan pengawasan
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1	dokumen	0	0	0%							
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					85							
		Predikat Kinerja					Tinggi							

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	50	%			100%			97,89%			
A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Desa yang menerapkan dan menganggarkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	90	%			100%			100,00%		Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
1	Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dokumen	2	2	100%	0		100,00%		Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	kegiatan	0	0	0%	4	4	100%	Kegiatan program yang padat dalam waktu bersamaan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersendiri	kegiatan advokasi dilakukan bersamaan /bersinergi dengan lintas program	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)											
		Predikat Kinerja											
B	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	81	%					80%	800%		Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif

1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	0	1	100%	1	1	100,00%			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					100%							
		Predikat Kinerja					Tinggi							
C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Posyandu yang meningkat stratanya (Tingkat Perkembangan)	10	%									Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	dokumen	0	2	100%	2	2	100			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					100%							
		Predikat Kinerja					Tinggi							
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	85	%			85,14%							
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	dokumen	17	7	75,00%	6	30	100,00%				

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	dokumen	0	1	50,00%	1	2	100,00%				Renja dan Renja Perubahan
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	1	dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%				RKA Murni
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	100,00%	0	1	100,00%				RKA Perubahan
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	100,00%	0	1	100,00%				DPA Murni
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	1	dokumen	0	0	0,00%	1	1	100,00%				DPA Perubahan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	4	4	100,00%		4	100,00%				LKJIP, LKPJ, LPPD, SPM TAHUNAN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	20	laporan	5	15	75,00%	5	20	100,00%				Laporan evaluasi kinerja TW I-IV, SPM I-V, RFK JAN-DES
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					69,64%			100,00%				
		Predikat Kinerja					Sedang			Tinggi				
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2.712	dokumen			65,49%	2485		0				

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	589	orang	586	586	100%	586	586	99,49%				
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2500	dokumen	818	2318	93%	1667	2485	99,40%				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan	0	0	0%	0	1	100,00%				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran yang disusun	13	laporan	3	9	69,23%	4	13	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					62,31 %			#DIV/0!				
		Predikat Kinerja					Sedang			#DIV/0!				
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	18	dokumen			75%			0,00%				
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikat asset	16	dokumen	4	12	75%	4	16	100,00%				
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	10	dokumen			91,36%			0,00%				
1	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		110	stel	0	110	100%	110	110	100,00%				

2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		135	dokumen	33	100	74%	34	135	100,00%				
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	4	4	100%	0	4	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					91,36%			#DIV/0!				
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi			#DIV/0!				
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum yang disediakan	23	layanan			109,26%			0,00%				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	paket	0	19	100%	0	19	100,00%				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	paket	0	7	100%	0	7	100,00%				
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21	paket	0	21	100%	0	21	100,00%				
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	paket	0	3	100%	0	3	100,00%				
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan cetak dan penggandaan	1	paket	0	1	100%	0	1	100,00%				
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18	laporan	16	28	156%	20	48	266,67%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)				0	109,26%			#DIV/0!				

		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi			#DIV/0!				
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	23	buah		23	100%			0				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	5	jenis	5	5	100%	0	5	100,00%				
2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	unit	0	0	0%	0	0	#DIV/0!				
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12	jasa			75%			0,00%				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	3	9	75%	3	12	100,00%				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	3	9	75%	3	12	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					88%			#DIV/0!				
		Predikat Kinerja					Sangat Tinggi			#DIV/0!				
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	120	jasa			90%			0,00%				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai	2	unit	2	3	150%	0	3	150,00%				

	dan Perizinan Kendaraan Dinas													
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	62	unit	21	62	100%	0	62	100,00%				
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2	unit	0	0	0%	0	0	0,00%				
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12	unit	0	12	100%	0	12	100,00%				
5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	unit	0	1	100%	0	1	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)					88,33%			#DIV/0!				
		Predikat Kinerja					Tinggi			#DIV/0!				
		Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan (Jumlah Capaian Kinerja Program)	100%				58,14%							
		Predikat Kinerja					Tinggi							

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Realisasi Kinerja TW III	Realisasi Kinerja s/d Tw III	CAPAIAN % s/d TW III	Realisasi Kinerja TW IV	Realisasi Kinerja s/d Tw IV	CAPAIAN % s/d TW IV	Tim kerja Farmalkes dan PKRT telah menyiapkan acuan untuk pemilihan produk alak kesehatan yang telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan minimal 40 % sehingga memudahkan untuk pencarian produk yang kita inginkan			
											Hambatan	Solusi	Upaya Yang telah dilakukan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Kesehatan													
1	Program pemenuhan pelayanan UKP & UKM	Persentase Fasyankes (Puskesmas) yang Terakreditasi	100	%	5,56%	5,56%	5,56%	77,78%	83,33%	83,33%	Anggaran utk survey akreditasi hanya tersedia untuk 15 Puskesmas	Menganggarkan biaya survey akreditasi Puskesmas di Tahun 2024	Membentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB), melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi termasuk LIPA	
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai standar	100	%	72,2	72,2	72,20%	72,2	72,20%	72,20%	Belum tercapainya persentase kelengkapan alat kesehatan pada Puskesmas menjadi faktor rendahnya kumulatif SPA luang dari 100%	Memenuhi kebutuhan SPA di masing - masing Puskesmas sesuai dengan PMK 43 TH 2019	Memenuhi kebutuhan SPA di masing-masing Puskesmas secara bertahap	
		Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	100	%					54,14%	54,14%	Terdapat bbrp jenis obat esensial yg merupakan jenis obat program kewenangan kementerian kesehatan, dan kekosongan jenis obat di penyedia (misal : obat lambung)	Pengadaan dari JKN oleh Puskesmas	Pengadaan obat dan koordinasi dengan penyedia, mendorong penggunaan obat dgn indikasi yang sama (misal : antasida sirup diganti ranitidin tablet, amoxicilin 250 mg diganti amoxicilin 500 mg 1/2 tablet)	
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	Unit	0,30	0,30	30%	0,7	1	100%	pelaksanaan kontrak di mulai pada triwulan III		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
2	Pembangunan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	1	Unit	1	1,00	100%	0	1	100%				
3	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	Unit	6	6,00	66,67%	3	9	100%	waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang panjang		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	

4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	8	8,00	80,00%	2	10	100%	waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang panjang		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	0	0,40	40,00%	0,6	1	60%	pelaksanaan kontrak di mulai pada triwulan III			
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Unit	10	10,00	83,33%	2	12	100%	waktu masa pelaksanaan pekerjaan yang panjang		Percepatan pelaksanaan pelkerjaan konstruksi	
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	1	1,00	100,00%	0	1	100%				
8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	1	1,00	100,00%	1	1	100%				
9	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22	jenis	22	22,00	100,00%	0	22	100%				
10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan Puskesmas yang diadakan	1100	jenis	365	365	33,18%	735	1.100	100%	Belum ditemukan hambatan yg berarti , hanya terjadi efeisiensi dari pemelihan produk dannegosiasi ongkos kirim	Mempesiapkan sejak dini pencarian data alkes yg kandungan TKDN nya sesuai	Tim kerja Farmalkes dan PKRT telah menyiapkan acuan untuk pemilihan produk alat kesehatan yang telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan minimal 40 % sehingga memudahkan untuk pencarian produk alat kesehatan	
11	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	10	Unit	9	9,00	90,00%	1	10	100%				

12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan dikalibrasi	830	Unit	0	0	0	780	780	94%	Peralatan yang kita usulkan untuk dilakukan uji kalibrasi darl penyedia jasa dalam hal ini PBFK banjarbaru ,ada beberapa alat yang belum memiliki alat parameter uji sehingga alat yang akan dikalibrasi tidak semua bisa dilakukan .	Tim kerja sejak awal akan mempersiapkan tim untuk mencari BPFK mana yang lebih lengkap untuk bisa melakukan pengujian /kalibrasi	Tim kerja akan mencari referensi sebanyak mungkin tempat pengujian kalibrasi yang lebih lengkap parameter ujinya	
B	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Penerima layanan Dasar SPM Bidang P2P	100	Indeks		88	88,00%		93,33	93,33%				
		Indeks Penerima layanan Dasar SPM Bidang Kesmas	100	Indeks										
		Indeks Keluarga Sehat	0,3	Indeks		-	-		0,23	76,67%				
		Persentase Desa Sehat	70	%					81	86,17%				
		Persentase Orang Dengan HIV-AIDS Yang Mendapatkan Pengobatan ARV	90	%		74	74,00%		84,50	93,89%		Follow up dan pemantauan jadwal pengobatan ARV pada ODHA baru yang memenuhi syarat pengobatan	Follow up dan pemantauan jadwal pengobatan ARV pada ODHA baru yang memenuhi syarat pengobatan	
		Persentase KTR pada 7 Kawasan	85	%		71,3	71,30%		85,00	100,00%				

		al memiliki Surat Terdaftar	166	orang	32	165	99,40%	42	207	124,70%	Penyehat Tradisional (Hattra) yang telah didata oleh pengelola program Yankestrad Puskesmas masih banyak yang belum mengetahui bahwa mereka wajib memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan STPT		- Tim Kerja Kesehatan Tradisional Kabupaten bersama-sama dengan pengelola program Yankestrad di Puskesmas melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan terkait Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada Penyehat Tradisional baik Penyehat Tradisional perorangan maupun Penyehat Tradisional berkelompok. - Tim Kerja Kestrad Kabupaten dan Pengelola Program Yankestrad di Puskesmas memfasilitasi Hattra untuk mendapatkan STPT	
		Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu memiliki Jaminan Kesehatan	100	%	100	100	99,00%	100	100	100,00%				
		Jumlah FKTP yang memenuhi syarat Survey Akreditasi	18	Unit	18	18	100,00%	18	18	100,00%				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.594	Bumil	984	3.130	68,13%	1.243	4.373	95,19%	ibu Hamil masih belum Masuk Masa Persalinan	Melakukan Pendataan Ibu Hamil Oleh Puskesmas	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.594	Bulin	972	3.083	67,11%	1.061	4.144	90,20%	tidak semua ibu bersalin dilakukan Faskes	Melakukan koordinasi Linsek dan memperbaiki sarana dan Prasarana di Poskesdes	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.374	Bayi Baru Lahir	925	2.886	65,98%	1961	4.058	92,78%	kunjungan Bayi masih belum mencapai Kunjungan sesuai Terstandar (KN4)	Meningkatkan Koordinasi Linsek	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	

4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19.122	Balita	10.070	19.122	100,00%	890	12.236	63,99%	yang Datang ke Faskes hanya Balita yang IMMUNISASI yang sehat Tidak berkunjung secara AKTIF	Meningkatkan Koordinasi Linsek	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	47.885	Orang	8.874	21.865	45,66%	7524	46.342	96,78%			Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	185.056	Orang	68.727	132.473	71,59%	29487	161.964	87,52%	Kegiatan Posbindu Mobile dan Institusi belum dilaksanakan maksimal		Monev ke Pengelola Program Puskesmas	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.859	Orang	3.827	14.394	72,48%		19.380	97,59%	1. lemahnya pemanfaatan kohor Lansia (eKohor belum digunakan).. 2. Rotasi pengelola program di puskesmas yang cukup tinggi.. 3. Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas masih secara manual.. 4. Integrasi Data dalam Satu Sehat masih dalam proses	Meningkatkan Skill Pengelola Lansia baik pencatatan dan Pelaporan Program	Pembinaan langsung dan tidak langsung ke Faskes	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pendeita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54.962	Orang	18.666	31.014	56,43%	8377	39.391	71,67%	Kurangnya koordinasi dengan jejaring Wilker Puskesmas		Monev ke Pengelola Program Puskesmas	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5.736	Orang	1.884	5.736	100,00%	3201	8.937	155,81%				
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yangb mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	421	Orang	18	441	104,75%	10	453	107,60%			Monev ke pengelola program puskesmas dan menjalin jejaring lintas sektor	

1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	503	Orang	194	605	120,28%	188	793	157,65%			Monev ke pengelola program puskesmas dan menjalin jejaring lintas sektor	
		Jumlah penemuan kasus suspek teduga TBC	5030	Orang	2071	4.206	83,62%	1.215	6.664	132,49%			Monev ke pengelola program puskesmas dan menjalin jejaring lintas sektor	
1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orangterduga menderit HIV yang mendapatkan pelyananan kesehatan sesui standar	6133	Orang	2565	5.700	92,94%	2183	7.883	128,53%				
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV-AIDS	Jumlah Kasus HIV-AIDS yang di obati (ODHA ON ART)	338	Orang	107	107	31,66%	194	301	89,05%			Peningkatan Layanan PDP (Perawatan, dukungan dan pengobatan) 4 layanan, calon pdp baru 3 layanan masih menunggu aktivasi.Penyediaan Pendamping ODHA (tetapi masih terbatas)	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan ksehatan gizi masyarakat	5	Dokumen	5	5	100,00%	5	5	100,00%				
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan ksehatan kerja dan olah raga	4	Dokumen	4	4	100%	4	4	100%			Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	5	5	100%	5	5	100%			Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lingkungan melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan Sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas	

16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehata	2	Dokumen	0	1	50%	1	2	100%			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait pergerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	Dokumen	1	3	75%	1	4	100%			Tim kerja Pelayanan Kesehatan Tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat secara rutin per triwulan melakukan koordinasi dengan pengelola program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas	Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Puskesmas disampaikan setiap triwulan
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	Dokumen	2	2	100%	0	2	100%	pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan III			Laporan Kegiatan Pelayanan Surveilans kesehatan tahun 2023
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1125	Orang	15	487	43%	10	497	44,2%	Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ	1. Meningkatkan pendekatan lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada keluarga 2. Membentuk kader kesehatan jiwa tingkat desa/kelurahan	Edukasi kepada keluarga dan advokasi lintas sektor terkait.	
20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%			Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal	

21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	243	Dokumen	60	185	76%	58	243	100%			
22	pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	Spesimen	13	13	100%	7	21	105%			Tim surveilans dan imunisasi berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit dalam penemuan kasus dan penambilan spesimen sesuai standar
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	3	6	50%	9	12	100%			membuat pertanggungjawaban tagihan secara berkala setiap bulannya
24	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%			
25	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	Dokumen	3	6	50%	3	6	100%			
26	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	3	6	50%	12	12	100%			melakukan pertanggungjawaban kegiatan secara berkala setiap bulannya
													SPJ dibuat setiap bulansesuai dengan tagian BRJS Kesehatan
													SPJ di lakukan setiap bulan oleh puskesmas untuk operasional puskesmas

27	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%			pembuatan dokumen dana Hibah PMI untuk bisa di terima oleh PMI sebagai anggaran operasional	Penyerapan anggaran dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan
28	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	Fasilitas	1	1	6%	15	15	83%	Anggaran tersedia hanya untuk 15 Puskesmas	Direncanakan terakreditasi di tahun 2024	Melakukan penambahan anggaran dalam anggaran perubahan	Upaya penambahan sasaran survei akreditasi pada Anggaran perubahan didasarkan atas surat edaran Kemenkes bahwa terhitung 31 Desember fasyankes harus terakreditasi agar bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	18	Dokumen	3	10	56%	8	18	100%	Kekosongan bahan RDT untuk deteksi dini penyakit potensial KLB dan reagen pemeriksaan laboratorium rujukan	Pengajuan surat ke dikes provinsi permintaan RDT antigen,	Koordinasi dengan anggaran pembelian RDT antigen	
30	pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120	Orang	32	107	89%	26	133	111%			Peningkatan dan penambahan Layanan PDP	
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	425	Orang	0	0	0%	203	203	47,80%	Pemeriksaan hanya berdasarkan gejala malaria saja, untuk sasaran pemeriksaan terbatas karena RDT malaria kosong	Pengadaan RDT dan bahan pemeriksaan malaria	Pengajuan permintaan RDT sesuai jumlah sasaran	

C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan	100	%					100					
		Persentase laporan program yang menggunakan laporan elektronik berbasis web	70	%				100	100					
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20	Dokumen	5	15	75%	5	100					
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	1	100					
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	18	Alat	0	0	0	18	100					

D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki izin yang masih berlaku	100	%					95 %	95 %				
		Persentase Puskesmas melaksanakan Indeks Nasional Mutu Puskesmas	100	%										
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikann diawasi dan ditindaklanjuti perijinannnya	20	Fasyankes	5	15	75%	19	19	95%	Masih terkendala dengan sistem pendaftaran di OSS RBA	Terus dilakukan pendampingan terhadap pemohon	Pembinaan, monitoring dan evaluasi ke fasyankes lainnya secara berkala	Dimohon untuk dapat menambah anggaran agar pelaksanaan pembinaan dapat memenuhi target
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah bidang PME diikuti	5	Bidang	0	0	0	5	5	100%			Melakukan koordinasi lintas bidang agar Peningkatan Mutu Fasyankes tetap berjalan sesuai target	Koordinasi berjalan dengan baik antar lintas bidang
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	Fasilitas	18	18	100%	18	18	100%			Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala baik melalui Luring dan Daring	Dilakukan Monev ke 18 Puskesmas

		Jumlah Puskesmas yang mengikuti tahapan status BLUD	18	Puskesmas	15	15	83%	18	18	100%			Melakukan penilaian secara serentak melalui panitia kabupaten yang ditandai dengan SK Bupati	18 Puskesmas sudah dilakukan penilaian dan sudah di keluarkan Penetapan berupa SK Bupati
3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%			Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Fasyankes secara berkala	
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan kesehatan rujukan	20	Puskesmas	2	16	80%	20	20	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							83,33%					
		Predikat Kinerja							Tinggi					
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	75	%					72 %	72 %				
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga Kesehatan berpraktik memiliki izin yang masih berlaku	85	%		82%	82%		82 %					

1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	Dokumen	7	7	100%	7	7	100%				
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	Dokumen	1	5	71,42%	7	7	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							72%					
		Predikat Kinerja							Sedang					
B	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan	1	dokumen		1	100,00%							
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	1	1	100%				
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	274	orang	272	272	99,27%	272	272	100%				
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	Dokumen	4	4	35%	6	10	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							100%					

		Predikat Kinerja							Sangat Tinggi					
C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan/pelatihan/uji kompetensi	50	Orang		196	196							
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	222	Orang	196	196	88%	219	219	100%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							100%					
		Predikat Kinerja							Sangat Tinggi					
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian Yang Memenuhi Standar	100	%	100	100	100,00%			95 %				
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	48			48	100,00%							

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48	Dokumen	22	39	81,25%	9	48	100%	Tidak ada hambatan	mempertahankan kegiatan	Membuat jadwal kegiatan perbulan	
2	penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9	sarana	1	1	11,11%	5	6	66,66%	selama kegiatan dilaksanakan sudah tidak ditemukan lagi sarana yang belum berizin.	tidak di temukan lagi pelanggaran karena pemilik sudah sadar akan perlunya perizinan	menurunkan target pengawasan toko obat dan apotek yang tidak berizin	
3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	45	sarana	6	28	62,22%	11	39	86,66%	Kegiatan dilakukan setelah ada pengajuan permohonan izin sarana	tetap menunggu pengajuan dari pemilik baru	kerjasamanya dengan OSS DAN IAI untuk peningkatan pengajuan izin	

		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							95%					
		Predikat Kinerja							Sangat Tinggi					
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertntu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi	5	%		0	0%							
1	pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	Dokumen	0	0	0%							

2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga , Rumah makan / Restoran dan Depot Air MiNUM (DAM) yang memiliki sertifikat laik Higiene sanitasi	50	%	0	0	0%							
3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Dokumen	0	0	0%							
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)						0						
		Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Tidak Diisi					

C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah diperiksa dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	101	Buah		86	85							
1	Pemeriksaan postmarket pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	101	sampel	56	78	77.22%	23	101	100%	Target pemeriksaan sampel telah tercapai	membuat daftar rencana sampel yang akan dilakukan pengujian tahun berikutnya	1. Membuat daftar sampel pangan yang diuji berdasarkan penetapan riskbased sampling 2. Membuat daftar nama sarana IRTTP yang dikunjungi berdasarkan track record IRTTP, kasus, dan status IRTTP (aktif/ tidak aktif)	45 sampel pangan yang diujikan dan 56 sarana IRTTP yang telah dilakukan pengawasan
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1	dokumen	0	0	0%							
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								100%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	50	%			100%			97,89%				
A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Desa yang menerapkan dan menganggarkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	90	%			100%			100,00%			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait pergerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif

1	Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dokumen	2	2	100%	0		100,00%			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	kegiatan	0	0	0%	4	4	100%	Kegiatan program yang padat dalam waktu bersamaan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersendiri	Kegiatan program dalam waktu bersamaan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersendiri sehingga dilakukan kegiatan advokasi bersamaan/bersinergi dengan lintas program	kegiatan advokasi dilakukan bersamaan /bersinergi dengan lintas program	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								97,89%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				
B	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	81	%									Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	dokumen	0	1	100%	1	1	100,00%			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait penggerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								100%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				

C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Posyandu yang meningkat stratanya (Tingkat Perkembangan)	10	%									Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait pergerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	dokumen	0	2	100%	2	2	100			Meningkatkan selalu koordinasi dan klarifikasi / konfirmasi kepada pengelola promkes dan kepala puskesmas terkait capaian indikator posyandu aktif serta berkolaborasi /berkoordinasi dengan SOPD terkait pergerakan masyarakat hidup sehat (germas) sehingga capaian posyandu aktif 97,89% (186 posyandu aktif) dari 190 posyandu dan 2,1% (4 posyandu tidak aktif)	yang dimaksud 50 adalah persentase yaitu 50 % Posyandu Aktif
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								100%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	85	%										
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	dokumen	17	7	75,00%	6	30	100,00%				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	dokumen	0	1	50,00%	1	2	100,00%				Renja dan Renja Perubahan

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1	dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%				RKA Murni
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	100,00%	0	1	100,00%				RKA Perubahan
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	1	dokumen	1	1	100,00%	0	1	100,00%				DPA Murni
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	1	dokumen	0	0	0,00%	1	1	100,00%				DPA Perubahan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	4	4	100,00%		4	100,00%				LKJIP, LKPJ, LPPD, SPM TAHUNAN
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	20	laporan	5	15	75,00%	5	20	100,00%				Laporan evaluasi kinerja TW I-IV, SPM I-V, RPK JAN-DES
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								100,00%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2.712	dokumen			65,49%			0				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	589	orang	586	586	100%	586	586	99,49%				
2	Pelaksanaan penatausahaann dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2500	dokumen	818	2318	93%	1667	2485	99,40%				
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan	0	0	0%	0	1	100,00%				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran yang disusun	13	laporan	3	9	69,23%	4	13	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								65,49%				
		Predikat Kinerja								Sedang				
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	18	dokumen			75%			0,00%				
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikat asset	16	dokumen	4	12	75%	4	16	100,00%				

D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	10	dokumen			91,36%			0,00%				
1	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		110	stel	0	110	100%	110	110	100,00%				
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		135	dokumen	33	100	74%	34	135	100,00%				
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	4	4	100%	0	4	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								91,36%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum yang disediakan	23	layanan			109,26%			0,00%				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	paket	0	19	100%	0	19	100,00%				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	paket	0	7	100%	0	7	100,00%				

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21	paket	0	21	100%	0	21	100,00%				
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	paket	0	3	100%	0	3	100,00%				
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu penyediaan cetak dan penggandaan	1	paket	0	1	100%	0	1	100,00%				
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18	laporan	16	28	156%	20	48	266,67%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								100,00%				
		Predikat Kinerja								Sangat Tinggi				
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	23	buah		23	100%			0				
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	5	jenis	5	5	100%	0	5	100,00%				

2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	unit	0	0	0%	0	0	#DIV/0!				
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12	jasa			75%			0,00%				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	3	9	75%	3	12	100,00%				
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	3	9	75%	3	12	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								75,00%				
		Predikat Kinerja								Sedang				
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	120	jasa			90%			90,00%				

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai	2	unit	2	3	150%	0	3	150,00%				
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	62	unit	21	62	100%	0	62	100,00%				
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2	unit	0	0	0%	0	0	0,00%				
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12	unit	0	12	100%	0	12	100,00%				

5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	unit	0	1	100%	0	1	100,00%				
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)								90,00%				
		Predikat Kinerja								Tinggi				
	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan (Jumlah Capaian Kinerja Program (A+B+C)/ 3		100%							85,62%				
		Predikat Kinerja								Tinggi				

3.4 Capaian Target Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Pagu anggaran belanja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.160.633.777.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 149.126.266.168,00 atau persentase 92,82%.

Adapun rincian Sumber pendanaan Dinas Kesehatan yaitu :

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%	Sisa Pagu
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
a	DAK FISIK	Rp 3.965.060.000	Rp 3.390.916.585	86%	Rp 574.143.415
b	DAK NON FISIK				
	1.Kabupaten	Rp 4.421.698.000	Rp 3.460.636.269	78%	Rp 961.061.731
	2.Puskesmas	Rp 18.094.880.000	Rp 14.805.254.747	82%	Rp 3.289.625.253
2	BPOM	Rp 492.440.000	Rp 391.414.800	79%	Rp 101.025.200
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 133.659.690.000	Rp 127.078.043.762	95%	Rp 6.581.655.233
		Rp 160.633.777.000	Rp 149.126.266.168		Rp 11.507.510.832

Laporan penyerapan dana Sumber dana DAK,BPOM

NO	PROVINSI/KABUPAT EN/KOTA	DAK MURNI	DANA PENUNJANG	JUMLAH	R E A L I S A S I						SISA ANGGARAN		KET
					BOBOT	F I S I K		K E U A N G A N					
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	TTB	(Rp.)	(%)	TTB	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BOK Kabupaten/Kota	4.421.698.000		4.421.698.000	0,19	100%	5,19	Rp3.460.636.269	78%	4,06	961.061.731	22%	Bok kabupaten terdiri dari 6 Menu.Permasalahan / hambatan yang ditemukan : 1.Dalam pelaksanaan kegiatan kehadiran peserta tidak sesuai undangan. 2.Dalam penyerapan anggaran terkendala adanya Peraturan/Juknis bahwa dalam Klaim Perjalanan Dinas diharuskan Petugas yang berstatus PNS/ASN sehingga menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan berbanding ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. 3.Kegiatan - kegiatan yang menggunakan Narasumber diawal perencanaan adalah Narsum dari Luar daerah akan tetapi saat pelaksanaan kegiatan menggunakan Narasumber dari dalam daerah atau lokal. 4. Penyebab dalam pengadaan bahan atau alat yang digunakan tidak ada kesesuaian antara SBU / harga terlalu tinggi sehingga tidak bisa di laksanakan dalam SPJ Reel dilapangan. 5.Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, akan tetapi ada kekeliruan dalam pengelompokkan belanja pada SIPD sehingga ada uraian kegiatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. .6. Kegiatan telah 100 % dilakukan akan tetapi anggaran tidak bisa terserap 100 % dikarenakan adanya perubahan kurikulum setelah anggaran sudah disetujui, sehingga ada beberapa item tidak bisa di pergunakan atau tidak bisa dimanfaatkan

2	BOK Puskesmas	18.094.880.000		18.094.880.000	0,79	100%	1,27	Rp14.805.254.747	82%	1,04	3.289.625.253	18%	<p>Bok Puskesmas terdiri dari 5 Menu kegiatan. Permasalahan / hambatan yang ditemukan :</p> <p>1. Penetapan Untuk pelaksanaan BOK Puskesmas dengan sistem BOK Salur baru dimulai diawal Juli .</p> <p>2.Implementasi dilapangan banyak kendala dengan sistem administrasi baru dan petugas di puskesmas perlu betrdaptasi dengan tata kelola baru.</p> <p>3.Kegiatan dapat di SPJkan bulan Mei.</p> <p>4.Petugas dilapangan masih kurang aktif mencari informasi sehingga menghambat dalam penyerpan anggaran pada Puskesmas masing - masing walaupun petugas dari kabupaten sudah menyediakan sarana informasi melalui grup WA, tatap langsung, sosialisasi serta tersedia web Telegram dari Kemenkes.</p> <p>5.Peraturan untuk metode administrasi pengklaiman spj membebaskan puskesmas karena adanya peratauran yang berubah - ubah.</p>
3	Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000		429.440.000	0,02	100%	53,43	Rp391.414.800	91%	48,70	38.025.200	9%	
TOTAL		22.946.018.000	-	22.946.018.000				18.657.305.816			4.288.712.184		

														BELANJA OPERASIONAL												BELANJA APBD							
										URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG				PAGU APBD (Rp)				PAGU BELANJA OPERASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN			REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp)		REALISASI KEUANGAN		BELUM SP2D/SUDAH DILAKSANAKAN/PROSES KEUANGAN	REAL FISIK %	REALISASI KEUANGAN		BELUM SP2D/SUDAH DILAKSANAKAN/PROSES KEUANGAN	REAL FISIK %	
																			Rp	%					Rp	%							
1										2				3=4+8+12+16				4	5	6=5/4*100		7	Rp8		9	10=9/8*100			11	Rp12	13		14
										DINAS KESEHATAN + UPT				Rp160.633.77.000	Rp148.536.411.597	Rp137.767.093.319	92,75	Rp145.807.964.782				98,16	Rp12.097.365.403		Rp11.359.172.844	93,90	Rp12.086.910.960	99,91	Rp149.126.266.163	92,84	Rp158.214.593.054	98,49	
										DINAS KESEHATAN				Rp123.958.926.644	Rp112.886.569.490	Rp107.554.769.285	95,28	Rp112.593.669.628				99,74	Rp11.072.357.154		Rp10.368.872.982	93,65	Rp11.071.568.668	99,99	Rp117.923.642.267	95,13	Rp123.665.238.296	99,76	
1	02	01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp56.962.139.891	Rp56.908.552.404	Rp52.993.072.024	93,12	Rp56.898.117.104				99,98	Rp53.587.487		Rp52.800.000	98,53	Rp52.800.000	98,53	Rp53.045.872.024	93,12	Rp56.950.917.104	99,98	
1	02	01	2,01							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp237.132.800	Rp237.132.800,0	Rp229.401.774	96,74	Rp237.132.300				100,00							Rp229.401.774	96,74	Rp237.132.300	100,00	
1	02	01	2,01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp166.287.950	Rp166.287.950	Rp158.645.424	95,40	Rp166.287.950				100,00	Rp-						Rp158.645.424	95,40	Rp166.287.950	100,00	
1	02	01	2,01	02						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Rp10.865.000	Rp10.865.000	Rp10.819.000	99,58	Rp10.865.000				100,00							Rp10.819.000	99,58	Rp10.865.000	100,00	
1	02	01	2,01	03						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				Rp19.085.000	Rp19.085.000	Rp19.043.000	99,78	Rp19.085.000				100,00							Rp19.043.000	99,78	Rp19.085.000	100,00	
1	02	01	2,01	04						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Rp7.672.500	Rp7.672.500	Rp7.672.500	100,00	Rp7.672.500				100,00							Rp7.672.500	100,00	Rp7.672.500	100,00	
1	02	01	2,01	05						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Rp15.892.500	Rp15.892.500	Rp15.892.000	100,00	Rp15.892.000				100,00							Rp15.892.000	100,00	Rp15.892.500	100,00	
1	02	01	2,01	06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Rp5.449.850	Rp5.449.850	Rp5.449.850	100,00	Rp5.449.850				100,00							Rp5.449.850	100,00	Rp5.449.850	100,00	
1	02	01	2,01	07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp11.880.000	Rp11.880.000	Rp11.880.000	100,00	Rp11.880.000				100,00							Rp11.880.000	100,00	Rp11.880.000	100,00	
1	02	01	2,02							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp55.130.055.453	Rp55.130.055.453	Rp51.268.442.724	93,00	Rp55.130.055.453				100,00							Rp51.268.442.724	93,00	Rp55.130.055.453	100,00	
1	02	01	2,02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp54.522.151.549	Rp54.522.151.549	Rp50.674.408.946	92,94	Rp54.522.151.549				100,00							Rp50.674.408.946	92,94	Rp54.522.151.549	100,00	
1	02	01	2,02	03						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Rp488.568.804	Rp488.568.804	Rp474.870.524	97,20	Rp488.568.804				100,00							Rp474.870.524	97,20	Rp488.568.804	100,00	
1	02	01	2,02	05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Rp116.335.000	Rp116.335.000	Rp116.163.454	99,85	Rp116.335.000				100,00							Rp116.163.454	99,85	Rp116.335.000	100,00	
1	02	01	2,02	07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Rp3.000.100	Rp3.000.100	Rp2.999.800	99,99	Rp3.000.100				100,00							Rp2.999.800	99,99	Rp3.000.100	100,00	
1	02	01	2,03							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp12.584.434	Rp12.584.434	Rp3.250.000	25,83	Rp3.250.000				25,83	Rp-			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp3.250.000	25,83	Rp3.250.000	25,83	
1	02	01	2,03	02						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Rp12.584.434	Rp12.584.434	Rp3.250.000	25,83	Rp3.250.000				25,83	Rp-			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp3.250.000	25,83	Rp3.250.000	25,83	

1	0	2	0	5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp111.404.000	Rp111.404.000	Rp109.676.522	98,45		Rp111.404.000	100,00							Rp109.676.522	98,45	Rp111.404.000	100.00
1	0	2	0	5	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp54.945.000	Rp54.945.000	Rp54.945.000	100,00		Rp54.945.000	100,00							Rp54.945.000	100,00	Rp54.945.000	100.00
1	0	2	0	5	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp3.044.000	Rp3.044.000	Rp3.044.000	100,00		Rp3.044.000	100,00							Rp3.044.000	100,00	Rp3.044.000	100.00
2	0	3	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp53.415.000	Rp53.415.000	Rp51.687.522	96,77		Rp53.415.000	100,00							Rp51.687.522	96,77	Rp53.415.000	100.00
1	0	2	0	6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp522.798.004	Rp522.798.004	Rp514.023.991	98,32		Rp522.798.004	100,00							Rp514.023.991	98,32	Rp522.798.004	100.00
1	0	2	0	6	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp9.962.500	99,63		Rp10.000.000	100,00							Rp9.962.500	99,63	Rp10.000.000	100.00
1	0	2	0	6	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp79.998.608	Rp79.998.608	Rp79.843.500	99,81		Rp79.998.608	100,00							Rp79.843.500	99,81	Rp79.998.608	100.00
1	0	2	0	6	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp14.931.853	Rp14.931.853	Rp14.680.000	98,31		Rp14.931.853	100,00							Rp14.680.000	98,31	Rp14.931.853	100.00
1	0	2	0	6	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp5.437.435	Rp5.437.435	Rp4.450.000	81,84		Rp5.437.435	100,00							Rp4.450.000	81,84	Rp5.437.435	100.00
1	0	2	0	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp112.595.913	Rp112.595.913	Rp112.313.200	99,75		Rp112.595.913	100,00							Rp112.313.200	99,75	Rp112.595.913	100.00
1	0	2	0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp299.834.195	Rp299.834.195	Rp292.774.791	97,65		Rp299.834.195	100,00							Rp292.774.791	97,65	Rp299.834.195	100.00
	0	2	0	7		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp54.969.094	Rp1.381.607	Rp281.000	20,34		Rp281.241	20,36	Rp53.587.487	Rp52.800.000,00	98,53		Rp52.800.000,00	98,53	Rp53.081.000	96,57	Rp53.081.241	96,57
1	0	2	0	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp53.868.728	Rp281.241	Rp281.000	99,91		Rp281.241	100,00	Rp53.587.487	Rp52.800.000,00	98,53		Rp52.800.000,00	98,53	Rp53.081.000	98,54	Rp53.081.241	98,54
1	0	2	0	7	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Rp1.100.366	Rp1.100.366		0,00		0,00	Rp-		#DIV/0!			#DIV/0!	Rp-	0,00	Rp-	0,00	0,00
1	0	2	0	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp804.880.081	Rp804.880.081	Rp783.614.513	97,36		Rp804.880.081	100,00							Rp783.614.513	97,36	Rp804.880.081	100.00
1	0	2	0	8	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp525.680.881	Rp525.680.881	Rp505.633.817	96,19		Rp525.680.881	100,00							Rp505.633.817	96,19	Rp525.680.881	100.00
1	0	2	0	8	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp279.199.200	Rp279.199.200	Rp277.980.696	99,56		Rp279.199.200	100,00							Rp277.980.696	99,56	Rp279.199.200	100.00
1	0	2	0	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp88.316.025	Rp88.316.025	Rp84.381.500	95,54		Rp88.316.025	100,00	Rp-	Rp-	#DIV/0!		Rp-	#DIV/0!	Rp84.381.500	95,54	Rp88.316.025	100.00
1	0	2	0	9	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Rp25.640.500	Rp25.640.500	Rp25.606.500	99,87		Rp25.640.500	100,00							Rp25.606.500	#ERROR!	Rp25.640.500	100.00
1	0	2	0	9	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp37.692.839	Rp37.692.839	Rp34.499.000	91,53		Rp37.692.839	100,00							Rp34.499.000	91,53	Rp37.692.839	100.00
1	0	2	0	9	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp-			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp-		#DIV/0!			#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	0	2	0	9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp14.967.000	99,78		Rp15.000.000	100,00							Rp14.967.000	99,78	Rp15.000.000	100.00
1	0	2	0	9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp9.982.686	Rp9.982.686	Rp9.309.000	93,25		Rp9.982.686	100,00							Rp9.309.000	93,25	Rp9.982.686	100.00
1	0	2	0	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp53.382.244.895	Rp42.363.475.228	Rp41.592.477.975	98,18		Rp42.244.938.066	99,72	Rp11.018.769.667	Rp10.316.072.982	93,62		Rp11.018.768.668	100,00	Rp51.908.550.957	97,24	Rp53.263.706.734	99,78

1	0 2	0 2	2, 0 1		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.690.09 0.915	Rp275.0 30.915	Rp263.6 40.060	95,86	Rp275.030.915	100,00	Rp10.415.060.000	Rp9.731. 944.829	93,44	Rp10.415. 060.000	100,00	Rp9.995. 584.889	93,50	Rp10.690. 090.915	10 0,0 0
1	0 2	0 2	2, 0 1	0 2	Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp-	Rp-		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp-	Rp-	#DIV/0!		#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!
1	0 2	0 2	2, 0 1	0 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Rp180.000.0 00	Rp-		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp180.000.000	Rp179.71 3.700,00	99,84	Rp180.000. 000,00	100,00	Rp179.71 3.700	99,84	Rp180.000. 000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	0 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp400.000.0 00	Rp-		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp400.000.000	Rp398.65 3.250,00	99,66	Rp400.000. 000,00	100,00	Rp398.65 3.250	99,66	Rp400.000. 000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	0 6	Pengembangan Puskesmas	Rp1.825.000. 000						Rp1.825.000.000	Rp1.783. 813.500, 00	97,74	Rp1.825.00 0.000,00	100,00	Rp1.783. 813.500	97,74	Rp1.825.00 0.000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	0 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp1.095.000. 000						Rp1.095.000.000	Rp1.092. 661.580, 00	99,79	Rp1.095.00 0.000,00	100,00	Rp1.092. 661.580	99,79	Rp1.095.00 0.000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	0 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp70.000.00 0						Rp70.000.000	Rp69.739 950,00	99,63	Rp70.000.0 00,00	100,00	Rp69.739 950	99,63	Rp70.000.0 00	100 ,00
1	0 4	0 4	02 ,0 1	0 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp120.000.0 00	Rp-		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp120.000.000	Rp119.64 9.900,00	99,71	Rp120.000. 000,00	100,00	Rp119.64 9.900	99,71	Rp120.000. 000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Rp1.435.000. 000			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp1.435.000.000	Rp1.431. 397.780, 00	99,75	Rp1.435.00 0.000,00	100,00	Rp1.431. 397.780	99,75	Rp1.435.00 0.000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	1 1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rp100.000.0 00						Rp100.000.000	Rp99.695 .300,00	99,70	Rp100.000. 000,00	100,00	Rp99.695 .300	99,70	Rp100.000. 000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	1 2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp50.000.00 0						Rp50.000.000	Rp49.950 .000,00	99,90	Rp50.000.0 00,00	100,00	Rp49.950 .000	99,90	Rp50.000.0 00	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp715.000.00 0			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp715.000.000	Rp704.56 6.400	98,54	Rp715.000. 000	100,00	Rp704.56 6.400	98,54	Rp715.000. 000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp4.464.766. 000	Rp39.706 .000	Rp34.677 .160	87,33	Rp39.706.000	100,00	Rp4.425.060.000	Rp3.802. 103.469, 00	85,92	Rp4.425.06 0.000,00	100,00	Rp3.836. 780.629	85,93	Rp4.464.76 6.000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	1 8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp135.287.9 15	Rp135.28 7.915	Rp135.28 7.900	100,00	Rp135.287.915	100,00			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp135.28 7.900	100,00	Rp135.287. 915	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 1	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp100.037.0 00	Rp100.03 7.000	Rp93.675 .000	93,64	Rp100.037.000	100,00			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp93.675 .000	93,64	Rp100.037. 000	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp41.803.73 0.406	Rp41.37 5.520.66 3	Rp40.73 1.774.75 2	98,44	Rp41.256.983.501	99,71	Rp428.209.743	Rp424.9 72.153	99,24	Rp428.208 .744	100,00	Rp41.15 6.746.90 5	98,45	Rp41.685. 192.245	99, 72
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp19.990.00 0	Rp19.990 .000	Rp17.864 .000	89,36	Rp19.990.000	100,00						Rp17.864 .000	89,36	Rp19.990.0 00	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp20.156.38 4	Rp20.156 .384	Rp18.738 .300	92,96	Rp20.156.384	100,00						Rp18.738 .300	92,96	Rp20.156.3 84	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp9.922.000	Rp9.922. 000	Rp9.048. 000	91,19	Rp9.922.000	100,00						Rp9.048. 000	91,19	Rp9.922.00 0	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp41.974.26 6	Rp41.974 .266	Rp39.806 .700	94,84	Rp41.974.266	100,00						Rp39.806 .700	94,84	Rp41.974.2 66	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp14.962.00 0	Rp14.962 .000	Rp13.856 .100	92,61	Rp14.962.000	100,00						Rp13.856 .100	92,61	Rp14.962.0 00	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp14.820.00 0	Rp14.820 .000	Rp14.762 .000	99,61	Rp14.820.000	100,00						Rp14.762 .000	99,61	Rp14.820.0 00	100 ,00
1	0 2	0 2	2, 0 2	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp39.991.29 0	Rp39.991 .290	Rp39.437 .500	98,62	Rp39.991.200	100,00						Rp39.437 .500	98,62	Rp39.991.2 00	100 ,00

1	0	2	0	2	0	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp29.997.440	Rp29.997.440	Rp29.976.000	99,93		Rp29.997.440	100,00					Rp29.976.000	99,93	Rp29.997.440	100,00	
1	0	2	0	2	0	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp9.980.000	Rp9.980.000	Rp9.870.000	98,90		Rp9.980.000	100,00					Rp9.870.000	98,90	Rp9.980.000	100,00	
1	0	2	0	2	1	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp34.981.000	Rp34.981.000	Rp29.583.900	84,57		Rp34.981.000	100,00					Rp29.583.900	84,57	Rp34.981.000	100,00	
1	0	2	0	2	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp14.572.000	Rp14.572.000	Rp14.550.000	99,85		Rp14.572.000	100,00					Rp14.550.000	99,85	Rp14.572.000	100,00	
1	0	2	0	2	1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp80.223.600	Rp80.223.600	Rp77.842.480	97,03		Rp77.842.480	97,03					Rp77.842.480	97,03	Rp80.223.600	100,00	
1	1	0	2	2	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-		#DIV/0!		#DIV/0!						Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	
1	0	2	0	2	1	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp193.769.736	Rp193.769.736	Rp175.688.800	90,67		Rp193.769.736	100,00					Rp175.688.800	90,67	Rp193.769.736	100,00	
1	0	2	0	2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp59.443.137	Rp59.443.137	Rp58.802.850	98,92		Rp59.443.137	100,00					Rp58.802.850	98,92	Rp59.443.137	100,00	
1	0	2	0	2	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp192.421.066	Rp192.421.066	Rp190.333.450	98,92		Rp192.421.066	100,00					Rp190.333.450	98,92	Rp192.421.066	100,00	
1	0	2	0	2	1	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp94.199.155	Rp94.199.155	Rp64.400.000	68,37		Rp64.400.000	68,37					Rp64.400.000	68,37	Rp64.400.000	68,37	
1	0	2	0	2	1	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp29.998.369	Rp23.748.370	Rp23.603.000	99,39		Rp23.748.370	100,00	Rp6.249.999	Rp6.249.000,00	99,98	Rp6.249.000,00	99,98	Rp29.852.000	99,51	Rp29.998.369	100,00
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp191.657.942	Rp191.657.942	Rp122.707.165	64,02		Rp122.707.165	64,02					Rp122.707.165	64,02	Rp122.707.165	64,02	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp20.006.000	Rp20.006.000	Rp19.689.000	98,42		Rp20.006.000	100,00					Rp19.689.000	98,42	Rp20.006.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp-			#DIV/0!		Rp-	#DIV/0!					Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	
1	0	2	0	2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp50.219.000	Rp50.219.000	Rp47.905.000	95,39		Rp50.219.000	100,00					Rp47.905.000	95,39	Rp50.219.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp498.355.200	Rp498.355.200	Rp481.177.000	96,55		Rp481.177.000	96,55					Rp481.177.000	96,55	Rp481.177.000	96,55	
1	0	2	0	2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp30.835.699.000	Rp30.835.699.000	Rp30.826.643.352	99,97		Rp30.835.699.000	100,00					Rp30.826.643.352	99,97	Rp30.835.699.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp9.999.800	Rp9.999.800	Rp9.316.800	93,17		Rp9.999.800	100,00					Rp9.316.800	93,17	Rp9.999.800	100,00	
1	0	2	0	2	2	9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp289.300.710	Rp289.300.710	Rp288.094.584	99,58		Rp289.300.710	100,00	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp288.094.584	99,58	Rp289.300.710	100,00	
1	0	2	0	2	2	3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp2.938.946.907	Rp2.516.987.163	Rp2.368.157.324	94,09		Rp2.516.987.163	100,00	Rp421.959.744	Rp418.723.153,00	99,23	Rp421.959.744,00	100,00	Rp2.786.880.477	94,83	Rp2.938.946.907	100,00
1	0	2	0	2	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp5.493.201.254	Rp5.493.201.254	Rp5.207.833.447	94,81		Rp5.493.201.254	100,00					Rp5.207.833.447	94,81	Rp5.493.201.254	100,00	
1	0	2	0	2	2	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp487.100.000	Rp487.100.000	Rp453.600.000	93,12		Rp487.100.000	100,00					Rp453.600.000	93,12	Rp487.100.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-	#DIV/0!		Rp-	#DIV/0!					Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	
1	0	2	0	2	2	3	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp14.999.700	Rp14.999.700	Rp14.630.580	97,54		Rp14.772.880	98,49					Rp14.630.580	97,54	Rp14.772.880	98,49	
1	0	2	0	2	2	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp15.422.000	Rp15.422.000	Rp15.090.000	97,85		Rp15.422.000	100,00					Rp15.090.000	97,85	Rp15.422.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp39.851.200	Rp39.851.200	Rp36.105.920	90,60		Rp39.851.200	100,00					Rp36.105.920	90,60	Rp39.851.200	100,00	

1	0	2	0	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp17.570.250	Rp17.570.250	Rp12.661.500	72,06	Rp17.570.250	100,00					Rp12.661.500	72,06	Rp17.570.250	100,00	
1	0	2	0	3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp205.441.624	Rp29.941.700	Rp25.623.700	85,58	Rp29.941.700	100,00	Rp175.499.924	Rp159.156.000	90,69	Rp175.499.924	100,00	Rp184.779.700	89,94	Rp205.441.624	100,00
1	0	2	0	3	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp14.967.700	Rp14.967.700	Rp10.759.700	71,89	Rp14.967.700	100,00					Rp10.759.700	71,89	Rp14.967.700	100,00	
1	0	2	0	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp14.974.000	Rp14.974.000	Rp14.864.000	99,27	Rp14.974.000	100,00					Rp14.864.000	99,27	Rp14.974.000	100,00	
1	0	2	0	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Dinas Kesehatan)	Rp175.499.924	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp175.499.924	Rp159.156.000,00	90,69	Rp175.499.924,00	100,00	Rp159.156.000	90,69	Rp175.499.924	100,00
1	0	2	0	4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp682.981.950	Rp682.981.950	Rp571.439.463	83,67	Rp682.981.950	100,00	Rp-				Rp571.439.463	83,67	Rp682.981.950	100,00	
1	0	2	0	4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp9.999.950	Rp9.999.950	Rp9.846.950	98,47	Rp9.999.950	100,00					Rp9.846.950	98,47	Rp9.999.950	100,00	
1	0	2	0	4	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp-			#DIV/0!		#DIV/0!					Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	
1	0	2	0	4	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp642.924.000	Rp642.924.000	Rp532.604.238	82,84	Rp642.924.000	100,00					Rp532.604.238	82,84	Rp642.924.000	100,00	
1	0	2	0	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp30.058.000	Rp30.058.000	Rp28.988.275	96,44	Rp30.058.000	100,00					Rp28.988.275	96,44	Rp30.058.000	100,00	
1	0	2	0	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp12.747.988.658	Rp12.747.988.658	Rp12.301.023.486	96,49	Rp12.747.988.658	100,00					Rp12.301.023.486	96,49	Rp12.747.988.658	100,00	
1	0	2	0	1	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp19.427.000	97,14	Rp20.000.000	100,00					Rp19.427.000	97,14	Rp20.000.000	100,00	
1	0	2	0	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp9.657.000	96,57	Rp10.000.000	100,00					Rp9.657.000	96,57	Rp10.000.000	100,00	
1	0	2	0	1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp9.770.000	97,70	Rp10.000.000	100,00					Rp9.770.000	97,70	Rp10.000.000	100,00	
1	0	2	0	2	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp11.141.950.658	Rp11.141.950.658	Rp10.849.924.082	97,38	Rp11.141.950.658	100,00					Rp10.849.924.082	97,38	Rp11.141.950.658	100,00	
1	0	2	0	2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp9.924.700	99,25	Rp10.000.000	100,00					Rp9.924.700	99,25	Rp10.000.000	100,00	
1	0	2	0	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp11.098.875.658	Rp11.098.875.658	Rp10.808.379.582	97,38	Rp11.098.875.658	100,00					Rp10.808.379.582	97,38	Rp11.098.875.658	100,00	
1	0	2	0	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp33.075.000	Rp33.075.000	Rp31.619.800	95,60	Rp33.075.000	100,00					Rp31.619.800	95,60	Rp33.075.000	100,00	
1	0	2	0	3	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.586.038.000	Rp1.586.038.000	Rp1.431.672.404	90,27	Rp1.586.038.000	100,00					Rp1.431.672.404	90,27	Rp1.586.038.000	100,00	
1	0	2	0	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.586.038.000	Rp1.586.038.000	Rp1.431.672.404	90,27	Rp1.586.038.000	100,00					Rp1.431.672.404	90,27	Rp1.586.038.000	100,00	

1	0 2	0 4				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp419.051.000	Rp419.051.000	Rp368.931.000	88,04	Rp403.361.000	96,26					Rp368.931.000	88,04	Rp403.361.000	96,26
1	0 2	0 4	2 0 1			Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp130.180.680	Rp130.180.680	Rp118.160.000	90,77	Rp129.490.680	99,47					Rp118.160.000	90,77	Rp129.490.680	99,47
1	0 2	0 4	2 0 1	1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp106.619.680	Rp106.619.680	Rp95.564.000	89,63	Rp106.619.680	100,00					Rp95.564.000	89,63	Rp106.619.680	100,00
1	0 2	0 4	2 0 1	2		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp4.310.000	86,20	Rp4.310.000	86,20					Rp4.310.000	86,20	Rp4.310.000	86,20
1	0 2	0 4	2 0 1	3		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp18.561.000	Rp18.561.000	Rp18.286.000	98,52	Rp18.561.000	100,00					Rp18.286.000	98,52	Rp18.561.000	100,00
1	0 2	0 4	2 0 2			Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp-		Rp-	0,00					Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0 2	0 4	2 0 2	1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp-		Rp-	0,00					Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0 2	0 4	2 0 2	2		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	#DIV/0!					Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!
1	0 2	0 4	2 0 3			Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp116.344.610	Rp116.344.610	Rp109.094.000	93,77	Rp116.344.610	100,00					Rp109.094.000	93,77	Rp116.344.610	100,00
1	0 2	0 4	2 0 3	0 1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp116.344.610	Rp116.344.610	Rp109.094.000	93,77	Rp116.344.610	100,00					Rp109.094.000	93,77	Rp116.344.610	100,00
1	0 2	0 4	2 0 4			Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100,00	Rp10.000.000	100,00					Rp10.000.000	100,00	Rp10.000.000	100,00

1	02	04	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100,00	Rp10.000.000	100,00						Rp10.000.000	100,00	Rp10.000.000	100,00
1	02	04	206		Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp157.525.710	Rp157.525.710	Rp141.677.000	89,94	Rp157.525.710	100,00						Rp141.677.000	89,94	Rp157.525.710	100,00
1	02	04	206	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp157.525.710	Rp157.525.710	Rp141.677.000	89,94	Rp157.525.710	100,00						Rp141.677.000	89,94	Rp157.525.710	100,00
1	02	04	206	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Rp-	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!						Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp447.502.200	Rp447.502.200	Rp299.264.800	66,87	Rp299.264.800	66,87						Rp299.264.800	66,87	Rp299.264.800	66,87
1	2	5	201		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp86.450.000	Rp86.450.000	Rp67.020.800	77,53	Rp67.020.800	77,53						Rp67.020.800	77,53	Rp67.020.800	77,53
1	02	05	201	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp86.450.000	Rp86.450.000	Rp67.020.800	77,53	Rp67.020.800	77,53						Rp67.020.800	77,53	Rp67.020.800	77,53
1	2	5	202		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp30.000.100	Rp30.000.100	Rp12.852.000	42,84	Rp12.852.000	42,84						Rp12.852.000	42,84	Rp12.852.000	42,84
1	02	05	202	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp30.000.100	Rp30.000.100	Rp12.852.000	42,84	Rp12.852.000	42,84						Rp12.852.000	42,84	Rp12.852.000	42,84
1	2	5	203		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp331.052.100	Rp331.052.100	Rp219.392.000	66,27	Rp219.392.000	66,27						Rp219.392.000	66,27	Rp219.392.000	66,27
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						Rp1.135.446.800	Rp1.119.796.810	Rp858.698.827	76,68	Rp860.704.155		Rp15.649.990	Rp13.777.500,00		Rp15.649.990		Rp872.476.327	76,84	Rp872.476.327	76,84

1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp923.735.800	Rp908.085.810	Rp648.993.155	71,47	Rp648.993.155	71,47	Rp15.649.990	Rp13.777.500,00	88,04	Rp15.649.990	100,00	Rp662.770.655	71,75	Rp713.778.738	77,27
1	02	02	2,01			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp599.810.421	Rp584.160.431	Rp529.933.165	90,72	Rp529.933.165	90,72	Rp15.649.990	Rp13.777.500	88,04	Rp15.649.990	100,00	Rp543.710.665	90,65	Rp593.084.727	98,88
1	02	02	2,01	12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp15.649.990						Rp15.649.990	Rp13.777.500	88,04	Rp15.649.990	100,00	Rp13.777.500	88,04	Rp15.649.990	100,00
	02	02	2,01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	Rp528.634.497	Rp528.634.497	Rp482.548.607	91,28	Rp482.548.607	91,28						Rp482.548.607	91,28	Rp525.356.963	99,38
1	02	02	2,01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunpebg Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp55.525.934	Rp55.525.934	Rp47.384.558	85,34	Rp47.384.558	85,34						Rp47.384.558	85,34	Rp52.077.773	93,79
1	02	02	2,02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp185.028.379	Rp185.028.379	Rp119.059.990	64,35	Rp119.059.990	64,35						Rp119.059.990	64,35	Rp120.694.012	65,23
1	02	02	2,02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp185.028.379	Rp185.028.379	Rp119.059.990	64,35	Rp119.059.990	64,35						Rp119.059.990	64,35	Rp120.694.012	65,23
1	02	02	2,04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp138.897.000	Rp138.897.000	Rp71.803.872	51,70	Rp71.803.872	51,70						Rp71.803.872	51,70	Rp509.052.001	36,50
1	02	02	2,04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp138.897.000	Rp138.897.000	Rp71.803.872	51,70	Rp71.803.872	51,70						Rp71.803.872	51,70	Rp85.630.000	61,65
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp211.711.000	Rp211.711.000	Rp209.705.672	99,05	Rp211.711.000	100,00						Rp209.705.672	99,05	Rp211.711.000	100,00
1	02	03	2,02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp211.711.000	Rp211.711.000	Rp209.705.672	99,05	Rp211.711.000	100,00						Rp209.705.672	99,05	Rp211.711.000	100,00
1	02	03	2,02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp211.711.000	Rp211.711.000	Rp209.705.672	99,05	Rp211.711.000	100,00						Rp209.705.672	99,05	Rp211.711.000	100,00
INSTALASI FARMASI KABUPATEN							Rp5.578.523.756	Rp5.578.523.756	Rp4.883.090.450		Rp4.948.710.074	Rp188	Rp-	Rp-	#VALUE!	Rp-		Rp4.883.090.450	87,53	Rp5.345.065.788	95,82

1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp5.449.265.556	Rp5.449.265.556	Rp4.755.049.432	87,26	Rp4.819.451.874	88,44	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp4.755.049.432	87,26	Rp5.215.807.588	95,72
1	0 2	0 2	2,01			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.785.383.401	Rp4.785.383.401	Rp4.131.840.351	86,34	Rp4.158.052.451	86,89	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp4.131.840.351	86,34	Rp4.554.408.164	95,17
1	0 2	0 2	2,01	1 6		Pengadaan Obat, Vaksin	Rp2.413.782.375	Rp2.413.782.375	Rp2.278.360.370	94,39	Rp2.278.360.370	94,39			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp2.278.360.370	94,39	Rp2.317.231.080	96,00
1	0 2	0 2	2,01	1 7		Pengadaan Bahan Habis Pakai (Dinas Kesehatan)	Rp2.240.399.026	Rp2.240.399.026	Rp1.748.490.081	78,04	Rp1.748.490.081	78,04			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp1.748.490.081	78,04	Rp2.105.975.084	94,00
1	0 2	0 2	2,01	2 1		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp131.202.000	Rp131.202.000	Rp104.989.900	80,02	Rp131.202.000	100,00			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp104.989.900	80,02	Rp131.202.000	100,00
1	0 2	0 2	2,02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp663.882.155	Rp663.882.155	Rp623.209.081	93,87	Rp661.399.423	99,63	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp623.209.081	93,87	Rp661.399.423	99,63
1	0 2	0 2	2,02	0 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp295.609.000	Rp295.609.000	Rp273.619.700	92,56	Rp295.609.000	100,00						Rp273.619.700	92,56	Rp295.609.000	100,00
1	0 2	0 2	2,02	1 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp112.341.120	93,62	Rp120.000.000	100,00						Rp112.341.120	93,62	Rp120.000.000	100,00
1	0 2	0 2	2,02	3 4		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp248.273.155	Rp248.273.155	Rp237.248.261	95,56	Rp245.790.423	99,00			#DIV/0!		#DIV/0!	Rp237.248.261	95,56	Rp245.790.423	99,00
1	0 2	0 3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp129.258.200	Rp129.258.200	Rp128.041.018	99,06	Rp129.258.200	100,00	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp128.041.018	99,06	Rp129.258.200	100,00
1	0 2	0 3	2,02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp129.258.200	Rp129.258.200	Rp128.041.018	99,06	Rp129.258.200	100,00	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp128.041.018	99,06	Rp129.258.200	100,00
1	0 2	0 3	2,02	0 2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp104.005.200	Rp104.005.200	Rp103.708.328	99,71	Rp104.005.200	100,00	Rp-		#DIV/0!		#DIV/0!	Rp103.708.328	99,71	Rp104.005.200	100,00
1	0 2	0 3	2,02	0 3		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp25.253.000	Rp25.253.000	Rp24.332.690	96,36	Rp25.253.000	100,00						Rp24.332.690	96,36	Rp25.253.000	100,00
PUSKESMAS KOTA WARINGIN LAMAM							Rp1.533.050.961	Rp1.528.675.963	Rp1.135.672.061	74,29	Rp1.369.768.502	89,60	Rp4.374.998	Rp4.300.000,00	98,29	Rp4.374.998	100,00	Rp1.139.972.061	74,36	Rp1.374.143.500	89,63
1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.533.050.961	Rp1.528.675.963	Rp1.135.672.061	74,29	Rp1.369.768.502	89,60	Rp4.374.998	Rp4.300.000,00	98,29	Rp4.374.998	100,00	Rp1.139.972.061	74,36	Rp1.374.143.500	89,63

1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.657.000	Rp9.657.000	Rp3.624.000	37,53	Rp3.624.000	37,53	Rp-	Rp-				Rp3.624.000	37,53	Rp3.624.000	37,53
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.657.000	Rp9.657.000	Rp3.624.000	37,53	Rp3.624.000	37,53	Rp-	Rp-		Rp-		Rp3.624.000	37,53	Rp3.624.000	37,53
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.523.393.961	Rp1.519.018.963	Rp1.132.048.061	74,52	Rp1.366.144.502	89,94	Rp4.374.998	Rp4.300.000	98,29	Rp4.374.998	100,00	Rp1.136.348.061	74,59	Rp1.370.519.500	89,96
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp111.200.000	Rp111.200.000	Rp111.362.500	100,15	Rp111.362.500	100,15		Rp-		Rp-		Rp111.362.500	100,15	Rp111.362.500	100,15
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp23.375.000	97,40	Rp24.000.000	100,00						Rp23.375.000	97,40	Rp24.000.000	100,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp19.200.000	Rp19.200.000	Rp18.390.000	95,78	Rp19.200.000	100,00						Rp18.390.000	95,78	Rp19.200.000	100,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp16.800.000	Rp16.800.000	Rp13.175.000	78,42	Rp16.800.000	100,00				Rp-		Rp13.175.000	78,42	Rp16.800.000	100,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp15.300.000	100,00	Rp15.300.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp15.300.000	100,00	Rp15.300.000	100,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp30.600.000	Rp30.600.000	Rp23.970.000	78,33	Rp30.600.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp23.970.000	78,33	Rp30.600.000	100,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	02	2.02	14	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp263.446.961	Rp263.446.961	Rp113.640.000	43,14	Rp116.530.000	44,23		Rp-		Rp-		Rp113.640.000	43,14	Rp116.530.000	44,23
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp13.685.000	89,44	Rp15.300.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp13.685.000	89,44	Rp15.300.000	100,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp20.400.000	Rp20.400.000	Rp13.330.000	65,34	Rp20.400.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp13.330.000	65,34	Rp20.400.000	100,00
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp30.600.000	Rp30.600.000	Rp14.705.000	48,06	Rp30.600.000	100,00		Rp-		Rp-		#REF!		Rp30.600.000	100,00
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp14.705.000		Rp-	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp19.620.000	Rp19.620.000	Rp2.805.000	14,30	Rp19.620.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.805.000	14,30	Rp19.620.000	100,00
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp6.020.000	39,35	Rp15.300.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp6.020.000	39,35	Rp15.300.000	100,00

1	0	0	2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp169.080.000	Rp169.080.000	Rp152.580.000	90,24	Rp169.080.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp-		Rp152.580.000	90,24	Rp169.080.000	100,00	
1	0	0	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp466.056.000	Rp461.681.002	Rp448.103.666	97,06	Rp461.681.002	100,00	Rp4.374.998	Rp4.300.000	98,29	Rp4.374.998	100,00	Rp452.403.666	97,07	Rp466.056.000	100,00
1	0	0	2	2	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp4.080.000	40,00	Rp4.080.000	40,00		Rp-		Rp-	Rp4.080.000	40,00	Rp4.080.000	40,00	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp224.891.000	Rp224.891.000	Rp108.016.895	48,03	Rp224.891.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp108.016.895	48,03	Rp224.891.000	100,00	
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp10.835.000	70,82	Rp15.300.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp10.835.000	70,82	Rp15.300.000	100,00	
1	0	0	2	3	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	3		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	0	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp35.700.000	Rp35.700.000	Rp18.275.000	51,19	Rp35.700.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp18.275.000	51,19	Rp35.700.000	100,00	
1	0	0	2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	0	Penenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		
1	2	5	2	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-													

1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp-	Rp-													
PUSKESMAS RIAM DURIAN						Rp1.112.979.559	Rp1.097.369.880	Rp791.771.464	72,15	Rp1.068.324.880	97,35	Rp15.609.679	Rp11.161.500	71,50	Rp15.609.679	100,00	Rp802.932.964	72,14	Rp1.083.934.559	97,39
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.100.574.559	Rp1.084.964.880	Rp779.366.464	71,83	Rp1.055.919.880	97,32	Rp15.609.679	Rp11.161.500,00	71,50	Rp15.609.679		Rp790.527.964	71,83	Rp1.071.529.559	97,36
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.253.000	Rp9.253.000	Rp7.878.000	85,14	Rp9.253.000	100,00	Rp-					Rp7.878.000	85,14	Rp9.253.000	100,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.253.000	Rp9.253.000	Rp7.878.000	85,14	Rp9.253.000	100,00	Rp-					Rp7.878.000	85,14	Rp9.253.000	100,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.091.321.559	Rp1.075.711.880	Rp771.488.464	71,72	Rp1.046.666.880	97,30	Rp15.609.679	Rp11.161.500	71,50	Rp15.609.679	100,00	Rp782.649.964	71,72	Rp1.062.276.559	97,34
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp50.580.000	Rp50.580.000	Rp21.535.000	42,58	Rp21.535.000	42,58		Rp-		Rp-		Rp21.535.000	42,58	Rp21.535.000	42,58
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp50.100.000	Rp50.100.000	Rp45.970.000	91,76	Rp50.100.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp45.970.000	91,76	Rp50.100.000	100,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp43.610.000	Rp43.610.000	Rp36.290.000	83,21	Rp43.610.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp36.290.000	83,21	Rp43.610.000	100,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp21.470.000	Rp21.470.000	Rp20.040.000	93,34	Rp21.470.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp20.040.000	93,34	Rp21.470.000	100,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp10.580.000	Rp10.580.000	Rp10.580.000	100,00	Rp10.580.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.580.000	100,00	Rp10.580.000	100,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp13.360.000	Rp13.360.000	Rp9.700.000	72,60	Rp13.360.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.700.000	72,60	Rp13.360.000	100,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp10.020.000	Rp10.020.000	Rp9.965.000	99,45	Rp10.020.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.965.000	99,45	Rp10.020.000	100,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp10.020.000	Rp10.020.000	Rp9.640.000	96,21	Rp10.020.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.640.000	96,21	Rp10.020.000	100,00

1	0 2	0 2	2. 02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	0 2	2. 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp204.227.559	Rp204.227.559	Rp92.765.000	45,42	Rp204.227.559	100,00		Rp-		Rp-		Rp92.765.000	45,42	Rp204.227.559	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp12.550.000	Rp12.550.000	Rp12.550.000	100,00	Rp12.550.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp12.550.000	100,00	Rp12.550.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp30.070.000	Rp30.070.000	Rp28.730.000	95,54	Rp30.070.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp28.730.000	95,54	Rp30.070.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp31.765.000	Rp31.765.000	Rp25.535.000	80,39	Rp31.765.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp25.535.000	80,39	Rp31.765.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp22.670.000	Rp22.670.000	Rp17.295.000	76,29	Rp22.670.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp17.295.000	76,29	Rp22.670.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp13.725.000	Rp13.725.000	Rp11.640.000	84,81	Rp13.725.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp11.640.000	84,81	Rp13.725.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp151.705.000	Rp151.705.000	Rp133.250.000	87,83	Rp151.705.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp133.250.000	87,83	Rp151.705.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp190.176.000	Rp174.566.321	Rp167.555.586	95,98	Rp174.566.321	100,00	Rp15.609.679	Rp11.161.500	71,50	Rp15.609.679	100,00	Rp178.717.086	93,97	Rp190.176.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-					Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp198.048.000	Rp198.048.000	Rp100.832.878	50,91	Rp198.048.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp100.832.878	50,91	Rp198.048.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp11.700.000	Rp11.700.000	Rp9.870.000	84,36	Rp11.700.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp9.870.000	84,36	Rp11.700.000	100.00
1	0 2	0 2	2. 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-					Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	39		Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp8.465.000	Rp8.465.000	Rp5.650.000	66,75	Rp8.465.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp5.650.000	66,75	Rp8.465.000	100,00
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp6.480.000	Rp6.480.000	Rp2.095.000	32,33	Rp6.480.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.095.000	32,33	Rp6.480.000	100,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp12.405.000	Rp12.405.000	Rp12.405.000		Rp12.405.000			Rp-		Rp-		Rp12.405.000	100,00	Rp12.405.000	100,00
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.405.000	Rp12.405.000	Rp12.405.000		Rp12.405.000							Rp12.405.000	100,00	Rp12.405.000	100,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp12.405.000	Rp12.405.000	Rp12.405.000		Rp12.405.000							Rp12.405.000	100,00	Rp12.405.000	100,00
PUSKESMAS IPUH BERANGKUT JAY A						Rp990.622.389	Rp987.085.407	Rp841.599.515	85,26	Rp919.260.753	93,13	Rp3.536.982	Rp713.000	20,16	Rp3.536.982	100,00	Rp842.312.515	85,03	Rp922.797.735	93,15
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp981.122.389	Rp977.585.407	Rp832.099.515	85,12	Rp909.760.753	93,06	Rp3.536.982	Rp713.000,00	20,16	Rp3.536.982	100,00	Rp832.812.515	84,88	Rp913.297.735	93,09
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.434.654	Rp8.434.654	Rp5.400.000	64,02	Rp5.400.000	64,02		Rp-		Rp-		Rp5.400.000	64,02	Rp5.400.000	64,02
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp8.434.654	Rp8.434.654	Rp5.400.000	64,02	Rp5.400.000	64,02		Rp-		Rp-		Rp5.400.000	64,02	Rp5.400.000	64,02
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp972.687.735	Rp969.150.753	Rp826.699.515	85,30	Rp904.360.753	93,31	Rp3.536.982	Rp713.000	20,16	Rp3.536.982	100,00	Rp827.412.515	85,06	Rp907.897.735	93,34

1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp37.060.000	Rp37.060.000	Rp37.060.000	100,00	Rp37.060.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp37.060.000	100,00	Rp37.060.000	100,00	
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp21.420.000	Rp21.420.000	Rp15.300.000	71,43	Rp15.300.000	71,43	Rp-	Rp-	Rp15.300.000	71,43	Rp15.300.000	71,43	
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp14.960.000	Rp14.960.000	Rp14.960.000	100,00	Rp14.960.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp14.960.000	100,00	Rp14.960.000	100,00	
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp17.340.000	Rp17.340.000	Rp17.340.000	100,00	Rp17.340.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp17.340.000	100,00	Rp17.340.000	100,00	
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp48.960.000	Rp48.960.000	Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00	
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp27.200.000	Rp27.200.000	Rp10.200.000	37,50	Rp10.200.000	37,50	Rp-	Rp-	Rp10.200.000	37,50	Rp10.200.000	37,50	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp7.225.000	88,54	Rp8.160.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp7.225.000	88,54	Rp8.160.000	100,00	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-					Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	1	0	2	1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp2.040.000	100,00	Rp2.040.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp2.040.000	100,00	Rp2.040.000	100,00	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp207.603.735	Rp207.603.735	Rp172.034.735	82,87	Rp173.123.735	83,39	Rp-	Rp-	Rp172.034.735	82,87	Rp173.123.735	83,39	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp42.840.000	Rp42.840.000	Rp42.840.000	100,00	Rp42.840.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp42.840.000	100,00	Rp42.840.000	100,00	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp26.959.000	Rp26.959.000	Rp21.394.000	79,36	Rp26.959.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp21.394.000	79,36	Rp26.959.000	100,00	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp38.760.000	Rp38.760.000	Rp31.620.000	81,58	Rp38.760.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp31.620.000	81,58	Rp38.760.000	100,00	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp3.060.000	Rp3.060.000	Rp3.060.000	100,00	Rp3.060.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp3.060.000	100,00	Rp3.060.000	100,00	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	2	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp150.620.000	Rp150.620.000	Rp124.430.000	82,61	Rp150.620.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp124.430.000	82,61	Rp150.620.000	100,00	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp101.304.000	Rp97.767.018	Rp84.281.914	86,21	Rp97.767.018	100,00	Rp3.536.982	Rp713.000	20,16	Rp3.536.982	100,00	Rp84.994.914	100,00

1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp900.000	Rp900.000	Rp-	0,00	Rp-	0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	0,00	
1	02	02	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp188.141.000	Rp188.141.000	Rp165.563.866	88,00	Rp188.141.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp165.563.866	88,00	Rp188.141.000	100,00
1	02	02	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp10.880.000	Rp10.880.000	Rp10.200.000	93,75	Rp10.880.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.200.000	93,75	Rp10.880.000	100,00
1	02	02	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	39		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	202	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp1.870.000	22,92	Rp1.870.000	22,92		Rp-		Rp-		Rp1.870.000	22,92	Rp1.870.000	22,92
1	02	02	202	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-		Rp-								Rp-		Rp-		
1	02	02	202	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp-		Rp-								Rp-		Rp-		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-								Rp-		Rp-		
1	02	03	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-								Rp-		Rp-		
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-								Rp-		Rp-		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	100,00	Rp9.500.000	100,00					Rp9.500.000	100,00	Rp9.500.000	100,00	
1	2	5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	100,00	Rp9.500.000	100,00					Rp9.500.000	100,00	Rp9.500.000	100,00	
1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	100,00	Rp9.500.000	100,00									

1	0	2	2	0	2	1	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp233.169.250	Rp233.169.250	Rp142.445.000	61,09		Rp142.445.000	61,09		Rp-		Rp-			Rp142.445.000	61,09	Rp142.445.000	61,09	
1	0	2	2	0	2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp2.805.000	Rp2.805.000	Rp2.125.000	75,76		Rp2.805.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp2.125.000	75,76	Rp2.805.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp29.240.000	Rp29.240.000	Rp29.240.000	100,00		Rp29.240.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp29.240.000	100,00	Rp29.240.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	1	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp44.680.000	Rp44.680.000	Rp45.925.000	102,79		Rp44.680.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp45.925.000	102,79	Rp44.680.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	1	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	2	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp30.855.000	Rp30.855.000	Rp30.855.000	100,00		Rp30.855.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp30.855.000	100,00	Rp30.855.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp1.020.000	Rp1.020.000	Rp1.020.000	100,00		Rp1.020.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp1.020.000	100,00	Rp1.020.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-						Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	2	4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-		Rp-											Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp132.855.000	Rp132.855.000	Rp137.065.000	103,17		Rp132.855.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp137.065.000	103,17	Rp132.855.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp1.283.832.000	Rp1.171.324.863	Rp1.097.889.754	93,73		Rp1.171.324.863	100,00		Rp106.781.662		94,91		Rp112.507.137	100,00	Rp1.204.671.416	93,83	Rp1.283.832.000	100,00
1	0	2	2	0	2	2	7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp5.780.000	Rp5.780.000	Rp5.780.000	100,00		Rp5.780.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp5.780.000	100,00	Rp5.780.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	2	9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-						Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp193.737.040	Rp193.737.040	Rp139.597.792	72,06		Rp139.597.792	72,06		Rp-		Rp-			Rp139.597.792	72,06	Rp139.597.792	72,06	
1	0	2	2	0	2	3	4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp6.120.000	Rp6.120.000	Rp6.120.000	100,00		Rp6.120.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp6.120.000	100,00	Rp6.120.000	100,00	
1	0	2	2	0	2	3	7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	3	9		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		
1	0	2	2	0	2	4	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	100,00		Rp12.240.000	100,00		Rp-		Rp-			Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	

1	0 2	0 2	2. 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-							Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp2.550.000	Rp2.550.000	Rp2.550.000	100,00	Rp2.550.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.550.000	100,00	Rp2.550.000	100,00
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2, 0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp69.640.000	Rp69.640.000	Rp51.375.000	73,77	Rp51.375.000	73,77		Rp-		Rp-		Rp51.375.000	73,77	Rp51.375.000	73,77
1	2	5	2, 0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp69.640.000	Rp69.640.000	Rp51.375.000	73,77	Rp51.375.000	73,77									
1	0 2	0 5	2. 03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp69.640.000	Rp69.640.000	Rp51.375.000	73,77	Rp51.375.000	73,77						Rp51.375.000	73,77	Rp51.375.000	73,77
P U S K E S M A S M E N D A W A I						Rp2.020.492.449	Rp1.951.950.680	Rp1.682.149.229	86,18	Rp1.948.784.200	99,84	Rp68.541.769	Rp56.227.975	82,03	Rp68.541.769	100,00	Rp1.738.377.204	86,04	Rp2.017.325.969	99,84
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp2.004.267.449	Rp1.935.725.680	Rp1.665.924.229	86,06	Rp1.932.559.200	99,84	Rp68.541.769	Rp56.227.975,00	82,03	Rp68.541.769	100,00	Rp1.722.152.204	85,92	Rp2.001.100.969	99,84
1	0 2	0 2	2. 01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.046.000	Rp9.046.000	Rp6.390.000	70,64	Rp6.390.000	70,64		Rp-		Rp-		Rp6.390.000	70,64	Rp6.390.000	70,64
1	0 2	0 2	2. 01	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.046.000	Rp9.046.000	Rp6.390.000	70,64	Rp6.390.000	70,64		Rp-		Rp-		Rp6.390.000	70,64	Rp6.390.000	70,64
1	0 2	0 2	2, 0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.995.221.449	Rp1.926.679.680	Rp1.659.534.229	86,13	Rp1.926.169.200	99,97	Rp68.541.769	Rp56.227.975	82,03	Rp68.541.769	100,00	Rp1.715.762.204	85,99	Rp1.994.710.969	99,97
1	0 2	0 2	2. 02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp44.130.000	Rp44.130.000	Rp41.665.000	94,41	Rp44.130.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp41.665.000	94,41	Rp44.130.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp37.400.000	Rp37.400.000	Rp35.095.000	93,84	Rp37.400.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp35.095.000	93,84	Rp37.400.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp42.160.000	Rp42.160.000	Rp42.160.000	100,00	Rp42.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp42.160.000	100,00	Rp42.160.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp170.000	Rp170.000	Rp170.000	100,00	Rp170.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp170.000	100,00	Rp170.000	100,00

1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp15.640.000	Rp15.640.000	Rp15.640.000	100,00	Rp15.640.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp15.640.000	100,00	Rp15.640.000	100,00
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp30.600.000	Rp30.600.000	Rp30.600.000	100,00	Rp30.600.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp30.600.000	100,00	Rp30.600.000	100,00
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp5.440.000	66,67	Rp7.650.000	93,75		Rp-		Rp-		Rp5.440.000	66,67	Rp7.650.000	93,75
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp2.465.000	26,85	Rp9.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.465.000	26,85	Rp9.180.000	100,00
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	0	2	1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp284.525.369	Rp284.525.369	Rp151.644.000	53,30	Rp284.525.369	100,00		Rp-		Rp-		Rp151.644.000	53,30	Rp284.525.369	100,00
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp14.173.360	Rp14.173.360	Rp14.173.200	100,00	Rp14.173.200	100,00		Rp-		Rp-		Rp14.173.200	100,00	Rp14.173.200	100,00
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp27.795.000	Rp27.795.000	Rp27.795.000	100,00	Rp27.795.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp27.795.000	100,00	Rp27.795.000	100,00
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp66.401.720	Rp66.401.720	Rp66.401.400	100,00	Rp66.401.400	100,00		Rp-		Rp-		Rp66.401.400	100,00	Rp66.401.400	100,00
1	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp10.370.000	Rp10.370.000	Rp1.445.000	13,93	Rp10.370.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp1.445.000	13,93	Rp10.370.000	100,00
1	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-	
1	0	2	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp113.220.000	Rp113.220.000	Rp108.460.000	95,80	Rp113.220.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp108.460.000	95,80	Rp113.220.000	100,00
1	0	2	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp1.082.304.000	Rp1.013.762.231	Rp953.695.081	94,07	Rp1.013.762.231	100,00	Rp68.541.769	Rp56.227.975	82,03	Rp68.541.769	100,00	Rp1.009.923.056	93,31	Rp1.082.304.000	100,00
1	0	2	2	2	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp4.420.000	Rp4.420.000	Rp3.910.000	88,46	Rp4.420.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp3.910.000	88,46	Rp4.420.000	100,00
1	0	2	2	2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	3	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	3	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	2	3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0	0	2	02	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp193.692.000	Rp193.692.000	Rp148.235.548	76,53		Rp193.692.000	100,00			Rp-		Rp-		Rp148.235.548	76,53	Rp193.692.000	100,00
1	0	0	2	02	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp2.720.000	Rp2.720.000	Rp2.720.000	100,00		Rp2.720.000	100,00			Rp-		Rp-		Rp2.720.000	100,00	Rp2.720.000	100,00
1	0	0	2	02	3	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	3		Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp7.820.000	95,83		Rp8.160.000	100,00			Rp-		Rp-		Rp7.820.000	95,83	Rp8.160.000	100,00
1	0	0	2	02	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-				Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	0	2	02	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-				Rp-				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp16.225.000	Rp16.225.000	Rp16.225.000	100,00		Rp16.225.000	100,00			Rp-		Rp-		Rp16.225.000	100,00	Rp16.225.000	100,00
1	2	5		03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.225.000	Rp16.225.000	Rp16.225.000	100,00		Rp16.225.000	100,00							Rp16.225.000		Rp16.225.000	100,00
1	0	0	2	03	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp16.225.000	Rp16.225.000	Rp16.225.000	100,00		Rp16.225.000	100,00							Rp16.225.000	100,00	Rp16.225.000	100,00
M A D U R E J O							Rp2.223.650.367	Rp2.084.716.221	Rp1.920.922.537	92,14		Rp2.001.428.532	96,00		Rp138.934.146	Rp138.245.000	99,50	Rp138.245.000	99,50	Rp2.059.167.537	92,60	Rp2.139.673.532	96,22
1	0	0	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp2.200.800.367	Rp2.061.866.221	Rp1.902.127.537	92,25		Rp1.978.578.532	95,96		Rp138.934.146	Rp138.245.000	99,50	Rp138.245.000		Rp2.040.372.537	92,71	Rp2.116.823.532	96,18
1	0	0	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.092.000	Rp11.092.000	Rp7.536.000	67,94		Rp11.092.000	100,00			Rp-		Rp-		Rp7.536.000	67,94	Rp11.092.000	100,00
1	0	0	2	01	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp11.092.000	Rp11.092.000	Rp7.536.000	67,94		Rp7.536.000	67,94			Rp-		Rp-		Rp7.536.000	67,94	Rp7.536.000	67,94
1	0	0	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.189.708.367	Rp2.050.774.221	Rp1.894.591.537	92,38		Rp1.967.486.532	95,94		Rp138.934.146	Rp138.245.000	99,50	Rp138.245.000	99,50	Rp2.032.836.537	92,84	Rp2.105.731.532	96,16

1	0	2	0	2	0	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp84.650.000	Rp84.650.000	Rp80.405.000	94,99		Rp84.650.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp80.405.000	94,99	Rp84.650.000	100,00
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp510.000	Rp510.000	Rp-	0,00		Rp-	0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp56.100.000	Rp56.100.000	Rp54.230.000	96,67		Rp56.100.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp54.230.000	96,67	Rp56.100.000	100,00
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp1.700.000	83,33		Rp2.040.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp1.700.000	83,33	Rp2.040.000	100,00
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp39.000.000	Rp39.000.000	Rp38.775.000	99,42		Rp39.000.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp38.775.000	99,42	Rp39.000.000	100,00
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp8.500.000	Rp8.500.000	Rp4.760.000	56,00		Rp8.500.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp4.760.000	56,00	Rp8.500.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp15.300.000	100,00		Rp15.300.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp15.300.000	100,00	Rp15.300.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp5.100.000	Rp5.100.000	Rp3.995.000	78,33		Rp5.100.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp3.995.000	78,33	Rp5.100.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	0	2	2	2	1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp328.947.367	Rp328.947.367	Rp221.796.000	67,43		Rp328.947.367	100,00		Rp-		Rp-		Rp221.796.000	67,43	Rp328.947.367	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp5.185.000	63,54		Rp8.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp5.185.000	63,54	Rp8.160.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp39.950.000	Rp39.950.000	Rp37.400.000	93,62		Rp39.950.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp37.400.000	93,62	Rp39.950.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp103.765.000	Rp103.765.000	Rp101.810.000	98,12		Rp103.765.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp101.810.000	98,12	Rp103.765.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp21.420.000	Rp21.420.000	Rp19.635.000	91,67		Rp21.420.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp19.635.000	91,67	Rp21.420.000	100,00
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp3.400.000	Rp3.400.000	Rp3.145.000	92,50		Rp3.400.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp3.145.000	92,50	Rp3.400.000	100,00
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp150.790.000	Rp150.790.000	Rp133.280.000	88,39		Rp150.790.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp133.280.000	88,39	Rp150.790.000	100,00
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp1.069.776.000	Rp930.841.854	Rp925.148.232	99,39		Rp852.229.165	91,55	Rp138.934.146	Rp138.245.000	99,50	Rp138.245.000	99,50	Rp1.063.393.232	99,40	Rp990.474.165	92,59

1	0	2	0	2	2	7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Rp425.000	Rp425.000	Rp170.000	40,00	Rp170.000	40,00	Rp-		Rp-		Rp170.000	40,00	Rp170.000	40,00
1	0	2	0	2	2	9	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	0	2	0	2	2	2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp238.955.000	Rp238.955.000	Rp238.847.305	99,95	Rp238.955.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp238.847.305	99,95	Rp238.955.000	100,00
1	0	2	0	2	2	3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp850.000	20,83	Rp850.000	20,83	Rp-		Rp-		Rp850.000	20,83	Rp850.000	20,83
1	0	2	0	2	2	3	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	3		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp6.800.000	Rp6.800.000	Rp6.800.000	100,00	Rp6.800.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp6.800.000	100,00	Rp6.800.000	100,00
1	0	2	0	2	2	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp1.360.000	66,67	Rp1.360.000	66,67	Rp-		Rp-		Rp1.360.000	66,67	Rp1.360.000	66,67
1	0	2	0	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	3	2	0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0	2	0	3	2	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp22.850.000	Rp22.850.000	Rp18.795.000	82,25	Rp22.850.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp18.795.000	82,25	Rp22.850.000	100,00
1	2	5	2	0	3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp22.850.000	Rp22.850.000	Rp18.795.000	82,25	Rp22.850.000	100,00								
1	0	2	0	5	2	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp22.850.000	Rp22.850.000	Rp18.795.000	82,25	Rp22.850.000	100,00					Rp18.795.000	82,25	Rp22.850.000	100,00

P U S K E S M A S A T A I P E L I N G K A U																					
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.870.152.000	Rp1.717.788.509	Rp1.653.508.668	96,26	Rp1.714.433.509	99,80	Rp152.363.491	Rp124.315.923	81,59	Rp152.363.491	100,00	Rp1.777.824.591	95,06	Rp1.866.797.000	99,82
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.843.000	Rp10.843.000	Rp7.488.000	69,06	Rp7.488.000	69,06	Rp-	Rp-		Rp-		Rp7.488.000	69,06	Rp7.488.000	69,06
	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp10.843.000	Rp10.843.000	Rp7.488.000	69,06	Rp7.488.000	69,06	Rp-	Rp-		Rp-		Rp7.488.000	69,06	Rp7.488.000	69,06
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.781.459.000	Rp1.629.095.509	Rp1.568.170.668	96,26	Rp1.629.095.509	100,00	Rp152.363.491	Rp124.315.923	81,59	Rp152.363.491	100,00	Rp1.692.486.591	95,01	Rp1.781.459.000	100,00
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp26.520.000	Rp26.520.000	Rp26.520.000	100,00	Rp26.520.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp26.520.000	100,00	Rp26.520.000	100,00
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp68.760.000	Rp68.760.000	Rp69.015.000	100,37	Rp68.760.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp69.015.000	100,37	Rp68.760.000	100,00
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp3.805.000	Rp3.805.000	Rp3.805.000	100,00	Rp3.805.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp3.805.000	100,00	Rp3.805.000	100,00
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp18.700.000	Rp18.700.000	Rp18.700.000	100,00	Rp18.700.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp18.700.000	100,00	Rp18.700.000	100,00
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp9.210.000	Rp9.210.000	Rp7.680.000	83,39	Rp9.210.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp7.680.000	83,39	Rp9.210.000	100,00
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp48.960.000	Rp48.960.000	Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp33.915.000	Rp33.915.000	Rp29.835.000	87,97	Rp33.915.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp29.835.000	87,97	Rp33.915.000	100,00

1	1	0 2	2, 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2, 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp268.365.000	Rp268.365.000	Rp268.365.000	100,00	Rp268.365.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp268.365.000	100,00	Rp268.365.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp14.280.000	Rp14.280.000	Rp14.280.000	100,00	Rp14.280.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp14.280.000	100,00	Rp14.280.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp15.470.000	Rp15.470.000	Rp15.470.000	100,00	Rp15.470.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp15.470.000	100,00	Rp15.470.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp72.690.000	Rp72.690.000	Rp72.690.000	100,00	Rp72.690.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp72.690.000	100,00	Rp72.690.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp20.195.000	Rp20.195.000	Rp20.195.000	100,00	Rp20.195.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp20.195.000	100,00	Rp20.195.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp7.480.000	Rp7.480.000	Rp7.480.000	100,00	Rp7.480.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp7.480.000	100,00	Rp7.480.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp124.950.000	Rp124.950.000	Rp124.950.000	100,00	Rp124.950.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp124.950.000	100,00	Rp124.950.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp822.816.000	Rp670.452.509	Rp614.882.668	91,71	Rp670.452.509	100,00	Rp152.363.491	Rp124.315.923	81,59	Rp152.363.491	100,00	Rp739.198.591	89,84	Rp822.816.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
-	0 2	0 2	2, 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp216.333.000	Rp216.333.000	Rp216.333.000	100,00	Rp216.333.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp216.333.000	100,00	Rp216.333.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp9.010.000	Rp9.010.000	Rp9.010.000	100,00	Rp9.010.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.010.000	100,00	Rp9.010.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0 2	0 2	2. 02	3 9		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2, 02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp77.850.000	Rp77.850.000	Rp77.850.000	100,00	Rp77.850.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp77.850.000	100,00	Rp77.850.000	100,00
1	2	5	2, 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp77.850.000	Rp77.850.000	Rp77.850.000	100,00	Rp77.850.000	100,00						Rp77.850.000	100,00	Rp77.850.000	100,00
1	0 2	0 5	2. 03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp77.850.000	Rp77.850.000	Rp77.850.000	100,00	Rp77.850.000	100,00						Rp77.850.000	100,00	Rp77.850.000	100,00
PUSKESMAS KUMPAI BATUATAS						Rp1.380.808.363	Rp1.335.276.552	Rp1.135.406.090	85,03	Rp1.204.416.986	90,20	Rp45.531.811	Rp36.555.000	80,28	Rp36.555.000	80,28	Rp1.171.961.090	84,87	Rp1.240.971.986	89,87
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.355.118.363	Rp1.309.586.552	Rp1.109.776.090	84,74	Rp1.178.726.986	90,01	Rp45.531.811	Rp36.555.000	80,28	Rp36.555.000		Rp1.146.331.090	84,59	Rp1.215.281.986	89,68
1	0 2	0 2	2. 01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.420.000	Rp9.420.000	Rp4.356.000	46,24	Rp4.356.000	46,24		Rp-		Rp-		Rp4.356.000	46,24	Rp4.356.000	46,24
1	0 2	0 2	2. 01	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.420.000	Rp9.420.000	Rp4.356.000	46,24	Rp4.356.000	46,24		Rp-		Rp-		Rp4.356.000	46,24	Rp4.356.000	46,24
1	0 2	0 2	2, 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.345.698.363	Rp1.300.166.552	Rp1.105.420.090	85,02	Rp1.174.370.986	90,32	Rp45.531.811	Rp36.555.000	80,28	Rp36.555.000	80,28	Rp1.141.975.090	84,86	Rp1.210.925.986	89,98
1	0 2	0 2	2. 02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp119.920.000	Rp119.920.000	Rp107.255.000	89,44	Rp119.920.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp107.255.000	89,44	Rp119.920.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0	2	0	2	0	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-			Rp-				Rp-			Rp-									
1	0	2	0	2	2	0	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp3.060.000	75,00		Rp3.060.000	75,00			Rp-			Rp-			Rp3.060.000	75,00	Rp3.060.000	75,00
1	0	2	0	2	2	0	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp46.920.000	Rp46.920.000	Rp32.215.000	68,66		Rp32.215.000	68,66			Rp-			Rp-			Rp32.215.000	68,66	Rp32.215.000	68,66
1	0	2	0	2	2	0	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp25.840.000	Rp25.840.000	Rp25.840.000	100,00		Rp25.840.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp25.840.000	100,00	Rp25.840.000	100,00
1	0	2	0	2	2	0	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp18.360.000	Rp18.360.000	Rp18.360.000	100,00		Rp18.360.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp18.360.000	100,00	Rp18.360.000	100,00
1	0	2	0	2	2	0	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-		Rp-							Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	0	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-		Rp-							Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	1	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp6.120.000	Rp6.120.000	Rp6.120.000	100,00		Rp6.120.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp6.120.000	100,00	Rp6.120.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp7.310.000	89,58		Rp8.160.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp7.310.000	89,58	Rp8.160.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp3.060.000	37,50		Rp3.060.000	37,50			Rp-			Rp-			Rp3.060.000	37,50	Rp3.060.000	37,50
1	0	2	0	2	2	1	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-		Rp-							Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	1	0	2	2	2	1	4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp4.420.000	Rp4.420.000	Rp-	0,00		Rp-	0,00			Rp-			Rp-			Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0	2	0	2	2	1	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp235.855.566	Rp235.855.566	Rp147.275.000	62,44		Rp141.765.000	60,11			Rp-			Rp-			Rp147.275.000	62,44	Rp141.765.000	60,11
1	0	2	0	2	2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp510.000	37,50		Rp510.000	37,50			Rp-			Rp-			Rp510.000	37,50	Rp510.000	37,50
1	0	2	0	2	2	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp46.410.000	Rp46.410.000	Rp43.180.000	93,04		Rp46.410.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp43.180.000	93,04	Rp46.410.000	100,00
1	0	2	0	2	2	1	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp50.458.797	Rp50.458.797	Rp49.871.850	98,84		Rp50.458.797	100,00			Rp-			Rp-			Rp49.871.850	98,84	Rp50.458.797	100,00
1	0	2	0	2	2	1	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp11.900.000	Rp11.900.000	Rp6.290.000	52,86		Rp6.290.000	52,86			Rp-			Rp-			Rp6.290.000	52,86	Rp6.290.000	52,86
1	0	2	0	2	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp2.380.000	Rp2.380.000	Rp2.210.000	92,86		Rp2.380.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp2.210.000	92,86	Rp2.380.000	100,00
1	0	2	0	2	2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-														Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp137.700.000	Rp137.700.000	Rp126.990.000	92,22		Rp137.700.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp126.990.000	92,22	Rp137.700.000	100,00
1	0	2	0	2	2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp389.592.000	Rp344.060.189	Rp303.911.772	88,33		Rp344.060.189	100,00		Rp45.531.811	Rp36.555.000	80,28	Rp36.555.000	80,28		Rp340.466.772	87,39	Rp380.615.189	97,70	
1	0	2	0	2	2	2	7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Rp-		Rp-			Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	
1	0	2	0	2	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.105.000	92,08		Rp1.200.000	100,00			Rp-			Rp-			Rp1.105.000	92,08	Rp1.200.000	100,00

1	02	02	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-					Rp-			Rp-		Rp-			
-	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp211.222.000	Rp211.222.000	Rp205.896.468	97,48	Rp211.222.000	100,00		Rp-			Rp-	Rp205.896.468	97,48	Rp211.222.000	100,00	
1	02	02	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp6.120.000	Rp6.120.000	Rp6.120.000	100,00	Rp6.120.000	100,00		Rp-			Rp-	Rp6.120.000	100,00	Rp6.120.000	100,00	
1	02	02	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	39		Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp7.480.000	91,67	Rp8.160.000	100,00		Rp-			Rp-	Rp7.480.000	91,67	Rp8.160.000	100,00	
1	02	02	202	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	02	202	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp1.360.000	100,00	Rp1.360.000	100,00		Rp-			Rp-	Rp1.360.000	100,00	Rp1.360.000	100,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	03	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-			
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp25.690.000	Rp25.690.000	Rp25.630.000	99,77	Rp25.690.000	100,00		Rp-			Rp-	Rp25.630.000	99,77	Rp25.690.000	100,00	
1	2	5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.690.000	Rp25.690.000	Rp25.630.000	99,77	Rp25.690.000	100,00						Rp25.630.000	99,77	Rp25.690.000	100,00	
1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp25.690.000	Rp25.690.000	Rp25.630.000	99,77	Rp25.690.000	100,00						Rp25.630.000	99,77	Rp25.690.000	100,00	
PUSKESMAS RUTU						Rp1.083.413.114	Rp1.045.794.634	Rp887.718.595	84,88	Rp1.042.754.634	99,71		Rp37.618.480	Rp35.540.000	94,47	Rp37.618.480	100,00	Rp923.258.595	85,22	Rp1.080.373.114	99,72

1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.055.153.114	Rp1.017.534.634	Rp871.048.595	85,60	Rp1.014.494.634	99,70	Rp37.618.480	Rp35.540.000,00	94,47	Rp37.618.480	100,00	Rp906.588.595	85,92	Rp1.052.113.114	99,71
1	0 2	0 2	2 0 1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.155.919	Rp9.155.919	Rp4.590.000	50,13	Rp9.155.919	100,00	Rp-					Rp4.590.000	50,13	Rp9.155.919	100,00
1	0 2	0 2	2 0 1	2 0		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.155.919	Rp9.155.919	Rp4.590.000	50,13	Rp9.155.919	100,00	Rp-					Rp4.590.000	50,13	Rp9.155.919	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	2 0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.045.997.195	Rp1.008.378.715	Rp866.458.595	85,93	Rp1.005.338.715	99,70	Rp37.618.480	Rp35.540.000	94,47	Rp37.618.480	100,00	Rp901.998.595	86,23	Rp1.042.957.195	99,71
1	0 2	0 2	2 0 2	0 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp103.335.000	Rp103.335.000	Rp89.155.000	86,28	Rp103.335.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp89.155.000	86,28	Rp103.335.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	0 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 0 2	0 3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 0 2	0 4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp3.220.000	Rp3.220.000	Rp180.000	5,59	Rp180.000	5,59		Rp-		Rp-		Rp180.000	5,59	Rp180.000	5,59
1	0 2	0 2	2 0 2	0 5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp41.310.000	Rp41.310.000	Rp39.710.000	96,13	Rp41.310.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp39.710.000	96,13	Rp41.310.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	0 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp1.335.000	Rp1.335.000	Rp1.335.000	100,00	Rp1.335.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp1.335.000	100,00	Rp1.335.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	0 7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp24.150.000	Rp24.150.000	Rp16.090.000	66,63	Rp24.150.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp16.090.000	66,63	Rp24.150.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	0 8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 0 2	0 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 0 2	1 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp9.660.000	Rp9.660.000	Rp9.490.000	98,24	Rp9.660.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.490.000	98,24	Rp9.660.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp25.560.000	Rp25.560.000	Rp17.420.000	68,15	Rp25.560.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp17.420.000	68,15	Rp25.560.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 0 2	1 3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	0 2	2 0 2	1 4		Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp1.610.000	Rp1.610.000	Rp-	0,00	Rp1.610.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp1.610.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp191.233.195	Rp191.233.195	Rp185.808.195	97,16	Rp191.233.195	100,00		Rp-		Rp-		Rp185.808.195	97,16	Rp191.233.195	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp28.040.000	Rp28.040.000	Rp20.940.000	74,68	Rp28.040.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp20.940.000	74,68	Rp28.040.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp35.120.000	Rp35.120.000	Rp35.045.000	99,79	Rp35.120.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp35.045.000	99,79	Rp35.120.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 8		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp28.785.000	Rp28.785.000	Rp27.380.000	95,12	Rp28.785.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp27.380.000	95,12	Rp28.785.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	1 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 0 2	2 0		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp19.605.000	Rp19.605.000	Rp10.050.000	51,26	Rp19.605.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.050.000	51,26	Rp19.605.000	100,00
1	0 2	0 2	2 0 2	2 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp2.160.000	Rp2.160.000	Rp2.160.000	100,00	Rp2.160.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp2.160.000	100,00	Rp2.160.000	100,00	
1	0	2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp150.465.000	Rp150.465.000	Rp134.825.000	89,61	Rp150.465.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp134.825.000	89,61	Rp150.465.000	100,00	
1	0	2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp151.200.000	Rp113.581.520	Rp109.299.028	96,23	Rp113.581.520	100,00	Rp37.618.480	Rp35.540.000	94,47	Rp37.618.480	100,00	Rp144.839.028	95,79	Rp151.200.000	100,00
1	0	2	2	7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp195.989.000	Rp195.989.000	Rp136.991.372	69,90	Rp195.989.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp136.991.372	69,90	Rp195.989.000	100,00	
1	0	2	2	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp9.090.000	Rp9.090.000	Rp7.575.000	83,33	Rp9.090.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp7.575.000	83,33	Rp9.090.000	100,00	
1	0	2	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	39				Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	2	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp10.680.000	Rp10.680.000	Rp11.375.000	106,51	Rp10.680.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp11.375.000	106,51	Rp10.680.000	100,00	
1	0	2	2	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp13.450.000	Rp13.450.000	Rp11.630.000	86,47	Rp13.450.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp11.630.000	86,47	Rp13.450.000	100,00	
1	0	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	3	202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	3	202	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp28.260.000	Rp28.260.000	Rp16.670.000	86,47	Rp28.260.000	100,00	Rp-		Rp-		Rp16.670.000	58,99	Rp28.260.000	100,00	

1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp28.260.000	Rp28.260.000	Rp16.670.000	86,47	Rp28.260.000	100,00						Rp16.670.000	58,99	Rp28.260.000	100,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp28.260.000	Rp28.260.000	Rp16.670.000	86,47	Rp28.260.000	100,00						Rp16.670.000	58,99	Rp28.260.000	100,00
PUSKESMAS KUMAI						Rp3.450.340.795	Rp3.377.003.401	Rp2.512.675.076	74,41	Rp3.138.408.406	92,93	Rp73.337.394	Rp61.253.899	83,52	Rp73.337.394	100,00	Rp2.573.928.975	74,60	Rp3.211.745.800	93,08
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp3.438.610.795	Rp3.365.273.401	Rp2.512.675.076	74,66	Rp3.138.408.406	93,26	Rp73.337.394	Rp61.253.899,00	83,52	Rp73.337.394	100,00	Rp2.573.928.975	74,85	Rp3.211.745.800	93,40
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.727.000	Rp11.727.000		0,00	Rp-	0,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp11.727.000	Rp11.727.000		0,00	Rp-	0,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.426.883.795	Rp3.353.546.401	Rp2.512.675.076	74,93	Rp3.138.408.406	93,58	Rp73.337.394	Rp61.253.899	83,52	Rp73.337.394	100,00	Rp2.573.928.975	75,11	Rp3.211.745.800	93,72
1	02	02	2.01	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp97.140.000	Rp97.140.000	Rp96.037.500	98,87	Rp97.140.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp96.037.500	98,87	Rp97.140.000	100,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-				Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.03	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.04	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp41.400.000	Rp41.400.000	Rp40.800.000	98,55	Rp41.400.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp40.800.000	98,55	Rp41.400.000	100,00
1	02	02	2.05	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp97.740.000	Rp97.740.000	Rp78.265.000	80,07	Rp97.740.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp78.265.000	80,07	Rp97.740.000	100,00
1	02	02	2.06	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp1.700.000	Rp1.700.000	Rp1.700.000	100,00	Rp1.700.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp1.700.000	100,00	Rp1.700.000	100,00
1	02	02	2.07	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp1.020.000	Rp1.020.000	Rp340.000	33,33	Rp340.000	33,33	Rp-	Rp-		Rp-		Rp340.000	33,33	Rp340.000	33,33
1	02	02	2.08	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-				Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.09	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.10	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp25.595.000	Rp25.595.000	Rp23.450.000	91,62	Rp25.595.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp23.450.000	91,62	Rp25.595.000	100,00
1	02	02	2.11	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp19.170.000	Rp19.170.000	Rp18.235.000	95,12	Rp19.170.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp18.235.000	95,12	Rp19.170.000	100,00
1	02	02	2.12	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp43.425.000	Rp43.425.000	Rp35.970.000	82,83	Rp43.425.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp35.970.000	82,83	Rp43.425.000	100,00
1	02	02	2.13	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-				Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	1	0 2	2, 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp293.172.795	Rp293.172.795	Rp261.333.658	89,14	Rp293.172.795	100,00		Rp-		Rp-		Rp261.333.658	89,14	Rp293.172.795	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp46.090.000	Rp46.090.000	Rp38.235.000	82,96	Rp46.090.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp38.235.000	82,96	Rp46.090.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp24.470.000	Rp24.470.000	Rp11.495.000	46,98	Rp24.470.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp11.495.000	46,98	Rp24.470.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp14.795.000	Rp14.795.000	Rp11.780.000	79,62	Rp14.795.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp11.780.000	79,62	Rp14.795.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp6.840.000	Rp6.840.000	Rp6.510.000	95,18	Rp6.840.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp6.510.000	95,18	Rp6.840.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-									Rp-			Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp257.570.000	Rp257.570.000	Rp217.515.000	84,45	Rp257.570.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp217.515.000	84,45	Rp257.570.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp2.182.392.000	Rp2.109.054.606	Rp1.611.102.913	76,39	Rp2.109.054.606	100,00	Rp73.337.394	Rp61.253.899	83,52	Rp73.337.394	100,00	Rp1.672.356.812	76,63	Rp2.182.392.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
-	0 2	0 2	2, 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp254.104.000	Rp254.104.000	Rp57.696.005	22,71	Rp57.696.005	22,71		Rp-		Rp-		Rp57.696.005	22,71	Rp57.696.005	22,71
1	0 2	0 2	2, 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp11.900.000	Rp11.900.000	Rp170.000	1,43	Rp170.000	1,43		Rp-		Rp-		Rp170.000	1,43	Rp170.000	1,43
1	0 2	0 2	2, 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0	0	2	3			Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-
1	0	0	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp2.040.000	100,00	Rp2.040.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.040.000	100,00	Rp2.040.000
1	0	0	2	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)		Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-
1	0	0	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp6.320.000	Rp6.320.000	Rp-	0,00	Rp-	0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-
1	0	0	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-
1	0	0	3	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-
1	0	0	3	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp11.730.000	Rp11.730.000	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-
1	2	5	3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.730.000	Rp11.730.000												
1	0	0	5	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp11.730.000	Rp11.730.000	Rp-	0,00	Rp-	0,00								
P						Rp1.890.125.869	Rp1.728.060.303	Rp1.573.007.480	91,03	Rp1.643.250.303	95,09	Rp162.065.566	Rp148.629.000	91,71	Rp162.065.566	100,00	Rp1.721.636.480	91,09	Rp1.805.315.869
1	0	0	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.808.885.869	Rp1.646.820.303	Rp1.491.447.480	90,57	Rp1.627.950.303	98,85	Rp162.065.566	Rp148.629.000,00	91,71	Rp162.065.566		Rp1.640.076.480	90,67	Rp1.790.015.869
1	0	0	2	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.420.000	Rp9.420.000	Rp4.704.000	49,94	Rp9.420.000	100,00						Rp4.704.000	49,94	Rp9.420.000
1	0	0	2	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.420.000	Rp9.420.000	Rp4.704.000	49,94	Rp9.420.000	100,00						Rp4.704.000	49,94	Rp9.420.000
1	0	0	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.799.465.869	Rp1.637.400.303	Rp1.486.743.480	90,80	Rp1.618.530.303	98,85	Rp162.065.566	Rp148.629.000	91,71	Rp162.065.566	100,00	Rp1.635.372.480	90,88	Rp1.780.595.869
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp93.370.000	Rp93.370.000	Rp92.735.000	99,32	Rp93.370.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp92.735.000	99,32	Rp93.370.000
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-

1	0	2	0	2	0	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp24.480.000	Rp24.480.000	Rp25.840.000	105,56		Rp24.480.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp25.840.000	105,56	Rp24.480.000	100,00	
1	0	2	0	2	0	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp20.060.000	Rp20.060.000	Rp17.340.000	86,44		Rp20.060.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp17.340.000	86,44	Rp20.060.000	100,00	
1	0	2	0	2	0	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp7.140.000	87,50		Rp8.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp7.140.000	87,50	Rp8.160.000	100,00	
1	0	2	0	2	0	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp8.160.000	100,00		Rp8.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp8.160.000	100,00	Rp8.160.000	100,00	
1	0	2	0	2	0	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	0	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	1	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp3.740.000	30,56		Rp6.120.000	50,00		Rp-		Rp-		Rp3.740.000	30,56	Rp6.120.000	50,00	
1	0	2	0	2	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp13.260.000	144,44		Rp9.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp13.260.000	144,44	Rp9.180.000	100,00	
1	0	2	0	2	1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp7.225.000	78,70		Rp9.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp7.225.000	78,70	Rp9.180.000	100,00	
1	0	2	0	2	1	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	1	0	2	0	2	1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp240.076.869	Rp240.076.869	Rp207.784.756	86,55		Rp240.076.869	100,00		Rp-		Rp-		Rp207.784.756	86,55	Rp240.076.869	100,00	
1	0	2	0	2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp4.080.000	100,00		Rp4.080.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp31.280.000	Rp31.280.000	Rp31.280.000	100,00		Rp31.280.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp31.280.000	100,00	Rp31.280.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp27.240.000	Rp27.240.000	Rp27.975.000	102,70		Rp27.240.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp27.975.000	102,70	Rp27.240.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	100,00		Rp3.570.000	29,17		Rp-		Rp-		Rp12.240.000	100,00	Rp3.570.000	29,17	
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp15.130.000	370,83		Rp4.080.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp15.130.000	370,83	Rp4.080.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp178.160.000	Rp178.160.000	Rp177.650.000	99,71		Rp178.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp177.650.000	99,71	Rp178.160.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp857.951.000	Rp695.885.434	Rp619.140.483	88,97		Rp695.885.434	100,00		Rp162.065.566	Rp148.629.000	91,71	Rp162.065.566	100,00	Rp767.769.483	89,49	Rp857.951.000	100,00
1	0	2	0	2	2	7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	0	2	0	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp6.120.000	Rp6.120.000	Rp6.120.000	100,00		Rp6.120.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp6.120.000	100,00	Rp6.120.000	100,00	
1	0	2	0	2	2	9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		

1	0 2	0 2	2 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
·	0 2	0 2	2 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp235.048.000	Rp235.048.000	Rp199.533.241	84,89	Rp235.048.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp199.533.241	84,89	Rp235.048.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp2.040.000	50,00	Rp4.080.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.040.000	50,00	Rp4.080.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 9			Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp6.120.000	Rp6.120.000	Rp2.040.000	33,33	Rp2.040.000	33,33		Rp-		Rp-		Rp2.040.000	33,33	Rp2.040.000	33,33
1	0 2	0 2	2 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)								Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp6.290.000	77,08	Rp8.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp6.290.000	77,08	Rp8.160.000	100,00
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2 02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2 02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp81.240.000	Rp81.240.000	Rp81.560.000	100,39	Rp15.300.000	18,83		Rp-		Rp-		Rp81.560.000	100,39	Rp15.300.000	18,83
1	2	5	2 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp81.240.000	Rp81.240.000	Rp81.560.000	100,39	Rp15.300.000	18,83						Rp81.560.000	100,39	Rp15.300.000	18,83
1	0 2	0 5	2 03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp81.240.000	Rp81.240.000	Rp81.560.000	100,39	Rp81.240.000	100,00						Rp81.560.000	100,39	Rp81.240.000	100,00

P U S K E S M A S T E L U K B O G A M																						
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.335.683.373	Rp1.335.683.373	Rp1.078.195.873	80,72	Rp1.251.133.000	93,67	Rp-	Rp-	#DIV/0!	Rp-	#DIV/0!	Rp1.078.195.873	80,72	Rp1.251.133.000	93,67	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.289.558.373	Rp1.289.558.373	Rp1.037.510.873	80,45	Rp1.205.008.000	93,44	Rp-	Rp-		Rp-		Rp1.037.510.873	80,45	Rp1.205.008.000	93,44	
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.630.000	Rp9.630.000	Rp5.526.000	57,38	Rp9.630.000	100,00										
1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.630.000	Rp9.630.000	Rp5.526.000	57,38	Rp9.630.000	100,00						Rp5.526.000	57,38	Rp9.630.000	100,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.279.928.373	Rp1.279.928.373	Rp1.031.984.873	80,63	Rp1.195.378.000	93,39	Rp-	Rp-		Rp-		Rp1.031.984.873	80,63	Rp1.195.378.000	93,39	
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp75.650.000	Rp75.650.000	Rp63.920.000	84,49	Rp75.650.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp63.920.000	84,49	Rp75.650.000	100,00	
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp50.830.000	Rp50.830.000	Rp46.495.000	91,47	Rp50.830.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp46.495.000	91,47	Rp50.830.000	100,00	
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp37.310.000	Rp37.310.000	Rp34.680.000	92,95	Rp37.310.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp34.680.000	92,95	Rp37.310.000	100,00	
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp17.340.000	Rp17.340.000	Rp14.280.000	82,35	Rp17.340.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp14.280.000	82,35	Rp17.340.000	100,00	
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp33.330.000	Rp33.330.000	Rp32.055.000	96,17	Rp33.330.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp32.055.000	96,17	Rp33.330.000	100,00	
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00	
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp1.870.000	Rp1.870.000	Rp1.870.000	100,00	Rp1.870.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp1.870.000	100,00	Rp1.870.000	100,00	
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp9.520.000	Rp9.520.000	Rp3.655.000	38,39	Rp9.520.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp3.655.000	38,39	Rp9.520.000	100,00	
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	1	02	2.02	14		Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp207.810.373	Rp207.810.373	Rp139.920.000	67,33	Rp139.920.000	67,33		Rp-		Rp-		Rp139.920.000	67,33	Rp139.920.000	67,33	

1	0 2	0 2	2 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp60.395.000	Rp60.395.000	Rp60.120.000	99,54	Rp60.395.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp60.120.000	99,54	Rp60.395.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp23.020.000	Rp23.020.000	Rp22.765.000	98,89	Rp23.020.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp22.765.000	98,89	Rp23.020.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp48.100.000	Rp48.100.000	Rp46.750.000	97,19	Rp48.100.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp46.750.000	97,19	Rp48.100.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp18.870.000	Rp18.870.000	Rp2.210.000	11,71	Rp2.210.000	11,71	Rp-	Rp-	Rp2.210.000	11,71	Rp2.210.000	11,71
1	0 2	0 2	2 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.115.000	99,17	Rp10.200.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp10.115.000	99,17	Rp10.200.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp126.980.000	Rp126.980.000	Rp91.475.000	72,04	Rp126.980.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp91.475.000	72,04	Rp126.980.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp316.596.000	Rp316.596.000	Rp266.992.980	84,33	Rp316.596.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp266.992.980	84,33	Rp316.596.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp5.610.000	Rp5.610.000	Rp5.100.000	90,91	Rp5.610.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp5.100.000	90,91	Rp5.610.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp207.937.000	Rp207.937.000	Rp163.401.893	78,58	Rp207.937.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp163.401.893	78,58	Rp207.937.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp10.540.000	Rp10.540.000	Rp9.435.000	89,52	Rp10.540.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp9.435.000	89,52	Rp10.540.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 9		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp7.820.000	Rp7.820.000	Rp6.545.000	83,70	Rp7.820.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp6.545.000	83,70	Rp7.820.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-	

1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp46.125.000	Rp46.125.000	Rp40.685.000	88,21	Rp46.125.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp40.685.000	88,21	Rp46.125.000	100,00
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp46.125.000	Rp46.125.000	Rp40.685.000	88,21	Rp46.125.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp40.685.000	88,21	Rp46.125.000	100,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp46.125.000	Rp46.125.000	Rp40.685.000	88,21	Rp46.125.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp40.685.000	88,21	Rp46.125.000	100,00
PUSKESMAS SEMANGGANG						Rp1.685.427.474	Rp1.626.706.010	Rp1.486.448.477	91,38	Rp1.619.786.010	99,57	Rp58.721.464	Rp56.280.000	95,84	Rp58.721.464	100,00	Rp1.542.728.477	91,53	Rp1.678.507.474	99,59
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.648.707.474	Rp1.589.986.010	Rp1.484.048.477	93,34	Rp1.583.066.010	99,56	Rp58.721.464	Rp56.280.000,00	95,84	Rp58.721.464		Rp1.540.328.477	93,43	Rp1.641.787.474	99,58
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.974.000	Rp9.974.000	Rp4.338.000	43,49	Rp9.974.000	100,00					Rp4.338.000	43,49	Rp9.974.000	100,00	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.974.000	Rp9.974.000	Rp4.338.000	43,49	Rp4.338.000	43,49					Rp4.338.000	43,49	Rp4.338.000	43,49	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.638.733.474	Rp1.580.012.010	Rp1.479.710.477	93,65	Rp1.573.092.010	99,56	Rp58.721.464	Rp56.280.000	95,84	Rp58.721.464	100,00	Rp1.535.990.477	93,73	Rp1.631.813.474	99,58
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp70.410.000	Rp70.410.000	Rp70.200.000	99,70	Rp70.410.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp70.200.000	99,70	Rp70.410.000	100,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.290.000	91,60	Rp2.720.000	108,80		Rp-		Rp-		Rp2.290.000	91,60	Rp2.720.000	108,80
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp33.855.742	Rp33.855.742	Rp30.345.000	89,63	Rp33.855.742	100,00		Rp-		Rp-		Rp30.345.000	89,63	Rp33.855.742	100,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp5.440.000	Rp5.440.000	Rp8.755.000	160,94	Rp5.440.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp8.755.000	160,94	Rp5.440.000	100,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp41.480.000	Rp41.480.000	Rp40.035.000	96,52	Rp41.480.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp40.035.000	96,52	Rp41.480.000	100,00

1	0	2	2	0	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-					Rp-			Rp-		Rp-						
1	0	2	2	0	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-					Rp-			Rp-		Rp-						
1	0	2	2	2	1	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp9.435.000	92,50		Rp10.200.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp9.435.000	92,50	Rp10.200.000	100,00		
1	0	2	2	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp15.045.000	Rp15.045.000	Rp18.445.000	122,60		Rp15.045.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp18.445.000	122,60	Rp15.045.000	100,00		
1	0	2	2	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp20.400.000	Rp20.400.000	Rp19.380.000	95,00		Rp20.400.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp19.380.000	95,00	Rp20.400.000	100,00		
1	0	2	2	2	3	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-							Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	1	0	2	2	4	1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-							Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	5	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp240.257.732	Rp240.257.732	Rp250.338.000	104,20		Rp240.257.732	100,00		Rp-		Rp-	Rp250.338.000	104,20	Rp240.257.732	100,00		
1	0	2	2	2	6	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp1.530.000	Rp1.530.000	Rp1.190.000	77,78		Rp1.530.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp1.190.000	77,78	Rp1.530.000	100,00		
1	0	2	2	2	7	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp10.370.000	67,78		Rp15.300.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp10.370.000	67,78	Rp15.300.000	100,00		
1	0	2	2	2	8	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp40.890.000	Rp40.890.000	Rp31.700.000	77,53		Rp40.890.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp31.700.000	77,53	Rp40.890.000	100,00		
1	0	2	2	2	9	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	0	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp7.990.000	Rp7.990.000	Rp3.955.000	49,50		Rp7.990.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp3.955.000	49,50	Rp7.990.000	100,00		
1	0	2	2	2	1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp7.650.000	Rp7.650.000	Rp6.800.000	88,89		Rp7.650.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp6.800.000	88,89	Rp7.650.000	100,00		
1	0	2	2	2	3	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-							Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	4	2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	5	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp161.670.000	Rp161.670.000	Rp200.042.000	123,73		Rp161.670.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp200.042.000	123,73	Rp161.670.000	100,00		
1	0	2	2	2	6	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp697.680.000	Rp638.958.536	Rp614.984.976	96,25		Rp638.958.536	100,00		Rp58.721.464	Rp56.280.000	95,84	Rp58.721.464	100,00	Rp671.264.976	96,21	Rp697.680.000	100,00
1	0	2	2	2	7	2	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	8	2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	9	2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	0	3	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	1	3	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-							Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	2	3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-	Rp-		Rp-			
1	0	2	2	2	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp222.065.000	Rp222.065.000	Rp126.640.501	57,03		Rp222.065.000	100,00		Rp-		Rp-	Rp126.640.501	57,03	Rp222.065.000	100,00		

1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp6.630.000	Rp6.630.000	Rp7.650.000	115,38	Rp6.630.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp7.650.000	115,38	Rp6.630.000	100,00
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	39			Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp30.600.000	Rp30.600.000	Rp27.155.000	88,74	Rp30.600.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp27.155.000	88,74	Rp30.600.000	100,00
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp7.140.000	Rp7.140.000	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp36.720.000	Rp36.720.000	Rp2.400.000	6,54	Rp36.720.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.400.000	6,54	Rp36.720.000	100,00
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp36.720.000	Rp36.720.000	Rp2.400.000	6,54	Rp36.720.000	100,00						Rp2.400.000	6,54	Rp36.720.000	100,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp36.720.000	Rp36.720.000	Rp2.400.000	6,54	Rp36.720.000	100,00						Rp2.400.000	6,54	Rp36.720.000	100,00
PUSKESMAS KARANGLAYU						Rp1.783.441.555	Rp1.748.089.121	Rp1.364.316.916	78,05	Rp1.612.964.566	92,27	Rp35.352.434	Rp106.057.254	300,00	Rp35.352.434	100,00	Rp1.470.374.170	82,45	Rp1.648.317.000	92,42
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.765.801.555	Rp1.730.449.121	Rp1.351.716.916	78,11	Rp1.600.364.566	92,48	Rp35.352.434	Rp106.057.254,00	300,00	Rp35.352.434	100,00	Rp1.457.774.170	82,56	Rp1.635.717.000	92,63
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.417.000	Rp9.417.000	Rp8.238.000	87,48	Rp9.417.000	100,00		Rp70.704.836				Rp78.942.836	838,30	Rp9.417.000	100,00

1	0 2	0 2	2. 01	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.417.000	Rp9.417.000	Rp8.238.000	87,48	Rp9.417.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp8.238.000	87,48	Rp9.417.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.756.384.555	Rp1.721.032.121	Rp1.343.478.916	78,06	Rp1.590.947.566	92,44	Rp35.352.434	Rp35.352.418	100,00	Rp35.352.434	100,00	Rp1.378.831.334	78,50	Rp1.626.300.000	92,59
1	0 2	0 2	2. 02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp155.550.000	Rp155.550.000	Rp128.095.000	82,35	Rp155.550.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp128.095.000	82,35	Rp155.550.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp2.040.000	Rp2.040.000		0,00		0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp30.430.000	Rp30.430.000	Rp24.565.000	80,73	Rp30.430.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp24.565.000	80,73	Rp30.430.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp20.400.000	Rp20.400.000	Rp14.365.000	70,42	Rp14.365.000	70,42		Rp-		Rp-		Rp14.365.000	70,42	Rp14.365.000	70,42
1	0 2	0 2	2. 02	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp18.360.000	Rp18.360.000	Rp14.620.000	79,63	Rp14.620.000	79,63		Rp-		Rp-		Rp14.620.000	79,63	Rp14.620.000	79,63
1	0 2	0 2	2. 02	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp38.760.000	Rp38.760.000	Rp38.760.000	100,00	Rp38.760.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp38.760.000	100,00	Rp38.760.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp26.775.000	Rp26.775.000	Rp26.010.000	97,14	Rp26.010.000	97,14		Rp-		Rp-		Rp26.010.000	97,14	Rp26.010.000	97,14
1	0 2	0 2	2. 02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp9.010.000	98,15	Rp9.010.000	98,15		Rp-		Rp-		Rp9.010.000	98,15	Rp9.010.000	98,15
1	0 2	0 2	2. 02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	0 2	2. 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp228.410.000	Rp228.410.000	Rp142.415.000	62,35	Rp142.415.000	62,35		Rp-		Rp-		Rp142.415.000	62,35	Rp142.415.000	62,35
1	0 2	0 2	2. 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp1.700.000	Rp1.700.000		0,00		0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0 2	0 2	2. 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp15.895.000	Rp15.895.000	Rp14.110.000	88,77	Rp14.110.000	88,77		Rp-		Rp-		Rp14.110.000	88,77	Rp14.110.000	88,77
1	0 2	0 2	2. 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp45.499.555	Rp45.499.555	Rp36.600.000	80,44	Rp36.600.000	80,44		Rp-		Rp-		Rp36.600.000	80,44	Rp36.600.000	80,44
1	0 2	0 2	2. 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp22.950.000	Rp22.950.000	Rp8.160.000	35,56	Rp8.160.000	35,56		Rp-		Rp-		Rp8.160.000	35,56	Rp8.160.000	35,56
1	0 2	0 2	2. 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp510.000	Rp510.000	Rp510.000	100,00	Rp510.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp510.000	100,00	Rp510.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0 2	0 2	2. 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp145.860.000	Rp145.860.000	Rp115.090.000	78,90	Rp145.860.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp115.090.000	78,90	Rp145.860.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp727.488.000	Rp692.135.566	Rp555.137.562	80,21	Rp692.135.566	100,00	Rp35.352.434	Rp35.352.418	100,00	Rp35.352.434	100,00	Rp590.489.980	81,17	Rp727.488.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp850.000	Rp850.000		0,00	Rp-	0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,00
1	0 2	0 2	2. 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp220.082.000	Rp220.082.000	Rp177.016.354	80,43	Rp220.082.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp177.016.354	80,43	Rp220.082.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp1.530.000	Rp1.530.000	Rp510.000	33,33	Rp510.000	33,33		Rp-		Rp-		Rp510.000	33,33	Rp510.000	33,33
1	0 2	0 2	2. 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 9									Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp35.700.000	Rp35.700.000	Rp32.385.000	90,71	Rp35.700.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp32.385.000	90,71	Rp35.700.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)								Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp8.415.000	Rp8.415.000	Rp6.120.000	72,73	Rp6.120.000	72,73		Rp-		Rp-		Rp6.120.000	72,73	Rp6.120.000	72,73
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-			Rp12.600.000			Rp-		Rp-		Rp-		Rp12.600.000	
1	0 2	0 3	2. 02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-			Rp12.600.000			Rp-		Rp-		Rp-		Rp12.600.000	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp17.640.000	Rp17.640.000	Rp12.600.000	71,43	Rp12.600.000	71,43		Rp-		Rp-		Rp12.600.000	71,43	Rp12.600.000	71,43
1	2	5	2. 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.640.000	Rp17.640.000	Rp12.600.000	71,43	Rp12.600.000	71,43									

1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp17.640.000	Rp17.640.000	Rp12.600.000	71,43	Rp12.600.000	71,43						Rp12.600.000	72,73	Rp12.600.000	71,43
PUSKESMAS PAANGKALANDA						Rp1.299.716.390	Rp1.278.517.910	Rp1.128.225.673	88,24	Rp1.194.826.483	93,45	Rp21.198.480	Rp14.723.800	69,46	Rp21.198.480	100,00	Rp1.142.949.473	87,94	Rp1.216.024.963	93,56
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.299.716.390	Rp1.278.517.910	Rp1.128.225.673	88,24	Rp1.194.826.483	93,45	Rp21.198.480	Rp14.723.800,00	69,46	Rp21.198.480		Rp1.142.949.473	87,94	Rp1.216.024.963	93,56
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.063.427	Rp13.063.427	Rp6.552.000	50,16	Rp6.552.000	50,16		Rp14.723.800		Rp21.198.480		Rp21.275.800	162,87	Rp27.750.480	212,43
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp13.063.427	Rp13.063.427	Rp6.552.000	50,16	Rp6.552.000	50,16		Rp-		Rp-		Rp6.552.000	50,16	Rp6.552.000	50,16
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.286.652.963	Rp1.265.454.483	Rp1.121.673.673	88,64	Rp1.188.274.483	93,90	Rp21.198.480	Rp-	0,00	Rp-	0,00	Rp1.121.673.673	87,18	Rp1.188.274.483	92,35
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp35.040.000	Rp35.040.000	Rp35.040.000	100,00	Rp35.040.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp35.040.000	100,00	Rp35.040.000	100,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.03	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp31.800.000	Rp31.800.000	Rp13.770.000	43,30	Rp31.800.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp13.770.000	43,30	Rp31.800.000	100,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp35.190.000	Rp35.190.000	Rp35.190.000	100,00	Rp35.190.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp35.190.000	100,00	Rp35.190.000	100,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp9.180.000	100,00	Rp9.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.180.000	100,00	Rp9.180.000	100,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp3.060.000	Rp3.060.000	Rp3.060.000	100,00	Rp3.060.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp3.060.000	100,00	Rp3.060.000	100,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp9.180.000	100,00	Rp9.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.180.000	100,00	Rp9.180.000	100,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	1	0 2	2, 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-			
1	0 2	0 2	2, 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp194.279.683	Rp194.279.683	Rp127.359.683	65,55	Rp117.099.683	60,27		Rp-		Rp-		Rp127.359.683	65,55	Rp117.099.683	60,27
1	0 2	0 2	2, 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp3.400.000	Rp3.400.000	Rp3.400.000	100,00	Rp3.400.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp3.400.000	100,00	Rp3.400.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp48.960.000	Rp48.960.000	Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp48.960.000	100,00	Rp3.400.000	6,94
1	0 2	0 2	2, 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp73.182.680	Rp73.182.680	Rp73.182.680	100,00	Rp73.182.680	100,00		Rp-		Rp-		Rp73.182.680	100,00	Rp73.182.680	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp2.805.000	Rp2.805.000	Rp2.805.000	100,00	Rp2.805.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.805.000	100,00	Rp2.805.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp30.600.000	Rp30.600.000	Rp30.600.000	100,00	Rp30.600.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp30.600.000	100,00	Rp30.600.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp169.660.000	Rp169.660.000	Rp161.670.000	95,29	Rp169.660.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp161.670.000	95,29	Rp169.660.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp432.861.600	Rp411.663.120	Rp392.247.537	95,28	Rp411.663.120	100,00	Rp21.198.480	Rp14.723.800	69,46	Rp21.198.480	100,00	Rp406.971.337	94,02	Rp432.861.600	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
-	0 2	0 2	2, 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp181.444.000	Rp181.444.000	Rp150.018.773	82,68	Rp181.444.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp150.018.773	82,68	Rp181.444.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp2.040.000	100,00	Rp2.040.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp2.040.000	100,00	Rp2.040.000	100,00
1	0 2	0 2	2, 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2, 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0 2	0 2	2. 02	3 9			Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp9.180.000	Rp9.180.000	Rp9.180.000	100,00	Rp9.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.180.000	100,00	Rp9.180.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)								Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp4.590.000	Rp4.590.000	Rp4.590.000	100,00	Rp4.590.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp4.590.000	100,00	Rp4.590.000	100,00
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5	2. 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-													
1	0 2	0 5	2. 03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp-	Rp-													
P U S K E S M A S P A N D U S A N J A Y A						Rp1.584.340.199	Rp1.520.148.138	Rp1.267.199.369	83,36	Rp1.355.789.908	89,19	Rp64.192.061	Rp60.265.982	93,88	Rp64.192.061	100,00	Rp1.327.465.351	83,79	Rp1.419.981.969	89,63
1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.578.220.199	Rp1.514.028.138	Rp1.261.079.369	83,29	Rp1.349.669.908	89,14	Rp64.192.061	Rp60.265.982,00	93,88	Rp64.192.061	100,00	Rp1.321.345.351	83,72	Rp1.413.861.969	89,59
1	0 2	0 2	2. 01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.563.000	Rp8.563.000	Rp4.704.000	54,93	Rp4.704.000	54,93		Rp-		Rp-		Rp4.704.000	54,93	Rp4.704.000	54,93
1	0 2	0 2	2. 01	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp8.563.000	Rp8.563.000	Rp4.704.000	54,93	Rp4.704.000	54,93		Rp-		Rp-		Rp4.704.000	54,93	Rp4.704.000	54,93
1	0 2	0 2	2. 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.569.657.199	Rp1.505.465.138	Rp1.256.375.369	83,45	Rp1.344.965.908	89,34	Rp64.192.061	Rp60.265.982	93,88	Rp64.192.061	100,00	Rp1.316.641.351	83,88	Rp1.409.157.969	89,77
1	0 2	0 2	2. 02	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp162.180.000	Rp162.180.000	Rp144.840.000	89,31	Rp162.180.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp144.840.000	89,31	Rp162.180.000	100,00
1	0 2	0 2	2. 02	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0 2	0 2	2 02	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp34.000.000	Rp34.000.000	Rp34.000.000	100,00	Rp34.000.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp34.000.000	100,00	Rp34.000.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp6.120.000	Rp6.120.000	Rp2.550.000	41,67	Rp2.550.000	41,67		Rp-		Rp-		Rp2.550.000	41,67	Rp2.550.000	41,67
1	0 2	0 2	2 02	0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp51.000.000	Rp51.000.000	Rp51.000.000	100,00	Rp51.000.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp51.000.000	100,00	Rp51.000.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp1.020.000	Rp1.020.000	Rp850.000	83,33	Rp1.020.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp850.000	83,33	Rp1.020.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp11.475.000	93,75	Rp12.240.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp11.475.000	93,75	Rp12.240.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp8.160.000	Rp8.160.000	Rp4.420.000	54,17	Rp8.160.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp4.420.000	54,17	Rp8.160.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	1	0 2	2 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp196.625.053	Rp196.625.053	Rp95.472.000	48,56	Rp87.397.000	44,45		Rp-		Rp-		Rp95.472.000	48,56	Rp87.397.000	44,45
1	0 2	0 2	2 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp9.945.000	Rp9.945.000	Rp9.945.000	100,00	Rp9.945.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp9.945.000	100,00	Rp9.945.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp19.890.000	Rp19.890.000	Rp19.465.000	97,86	Rp19.890.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp19.465.000	97,86	Rp19.890.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp26.520.000	Rp26.520.000	Rp24.480.000	92,31	Rp26.520.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp24.480.000	92,31	Rp26.520.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp10.880.000	Rp10.880.000	Rp10.880.000	100,00	Rp10.880.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp10.880.000	100,00	Rp10.880.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-					Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp131.920.000	Rp131.920.000	Rp119.247.000	90,39	Rp131.920.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp119.247.000	90,39	Rp131.920.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp698.184.000	Rp633.991.939	Rp574.471.400	90,61	Rp633.991.939	100,00	Rp64.192.061	Rp60.265.982	93,88	Rp64.192.061	100,00	Rp634.737.382	90,91	Rp698.184.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	

1	0 2	0 2	2. 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
.	0 2	0 2	2. 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp183.463.14 6	Rp183.46 3.146	Rp136.44 1.969	74,37	Rp136.441.969	74,37		Rp-		Rp-		Rp136.44 1.969	74,37	Rp136.441. 969	74, 37
1	0 2	0 2	2. 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp680.000	Rp680.00 0	Rp-	0,00	Rp-	0,00		Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp-	0,0 0
1	0 2	0 2	2. 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	3 9			Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp12.240.000	Rp12.240. .000	Rp12.248 .000	100,07	Rp12.240.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp12.248 .000	100,07	Rp12.240.0 00	100 ,00
1	0 2	0 2	2. 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)								Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2. 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp510.000	Rp510.00 0	Rp510.00 0		Rp510.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp510.00 0	100,00	Rp510.000	100 ,00
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2. 02	0 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp6.120.000	Rp6.120. 000	Rp6.120. 000	100,0 0	Rp6.120.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp6.120. 000	100,00	Rp6.120.0 00	10 0,0 0
1	2	5	2. 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.120.000	Rp6.120. 000	Rp6.120. 000	100,0 0	Rp6.120.000	100,00						Rp6.120. 000	100,00	Rp6.120.0 00	10 0,0 0
1	0 2	0 5	2. 03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp6.120.000	Rp6.120. 000	Rp6.120. 000	100,00	Rp6.120.000	100,00						Rp6.120. 000	100,00	Rp6.120.00 0	100 ,00

P U S K E S M A S A R U T U T A R A																						
	1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.344.909.088	Rp1.329.436.721	Rp1.215.429.328	91,42	Rp1.216.454.033	91,50	Rp15.472.367	Rp15.472.367	100,00	Rp15.472.367	100,00	Rp1.230.901.695	91,52	Rp1.231.926.400	91,60
	1	0 2	0 2	2.0 1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.932.000	Rp7.932.000	Rp4.596.000	57,94	Rp7.932.000	100,00	Rp-	Rp-	100,00	Rp15.472.367	100,00	Rp1.205.996.695	91,36	Rp1.207.021.400	91,44
	1	0 2	0 2	2.0 1	2 0		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp7.932.000	Rp7.932.000	Rp4.596.000	57,94	Rp7.932.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp4.596.000	57,94	Rp7.932.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.312.072.088	Rp1.296.599.721	Rp1.185.928.328	91,46	Rp1.183.617.033	91,29	Rp15.472.367	Rp15.472.367	100,00	Rp15.472.367	100,00	Rp1.201.400.695	91,57	Rp1.199.089.400	91,39
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp90.240.000	Rp90.240.000	Rp89.490.000	99,17	Rp90.240.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp89.490.000	99,17	Rp90.240.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp4.105.000	Rp4.105.000	Rp-	0,00	Rp4.105.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	0,00	Rp4.105.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp4.305.000	Rp4.305.000	Rp2.805.000	65,16	Rp4.305.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp2.805.000	65,16	Rp4.305.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp48.960.000	Rp48.960.000	Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp48.960.000	100,00	Rp48.960.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	0 2	0 2	2.0 2	0 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	0 2	0 2	2.0 2	1 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp6.800.000	Rp6.800.000	Rp6.800.000	100,00	Rp6.800.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp6.800.000	100,00	Rp6.800.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	1 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp24.480.000	Rp24.480.000	Rp24.480.000	100,00	Rp24.480.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp24.480.000	100,00	Rp24.480.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	1 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp16.320.000	Rp16.320.000	Rp16.320.000	100,00	Rp16.320.000	100,00	Rp-	Rp-		Rp-		Rp16.320.000	100,00	Rp16.320.000	100,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	1 3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-	Rp-				Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
	1	1	0 2	2.0 2	1 4		Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2.0 2	1 5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp246.208.088	Rp246.208.088	Rp133.225.400	54,11	Rp133.225.400	54,11	Rp-	Rp-		Rp-		Rp133.225.400	54,11	Rp133.225.400	54,11	

1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00	
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp8.500.000	Rp8.500.000	Rp8.500.000	100,00	Rp8.500.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp8.500.000	100,00	Rp8.500.000	100,00	
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp19.300.000	Rp19.300.000	Rp13.690.000	70,93	Rp19.300.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp13.690.000	70,93	Rp19.300.000	100,00	
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp26.520.000	Rp26.520.000	Rp24.990.000	94,23	Rp26.520.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp24.990.000	94,23	Rp26.520.000	100,00	
1	0	0	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-	Rp-			Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp10.200.000	Rp10.200.000	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp10.200.000	100,00	Rp10.200.000	100,00	
1	0	0	2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp238.680.000	Rp238.680.000	Rp238.680.000	100,00	Rp238.680.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp238.680.000	100,00	Rp238.680.000	100,00	
1	0	0	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp280.728.000	Rp265.255.633	Rp233.523.274	88,04	Rp265.255.633	100,00	Rp15.472.367	Rp15.472.367	100,00	Rp15.472.367	100,00	Rp280.728.000	100,00
1	0	0	2	2	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp220.766.000	Rp220.766.000	Rp268.304.654	121,53	Rp220.766.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp268.304.654	121,53	Rp220.766.000	100,00	
1	0	0	2	2	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp19.040.000		
1	0	0	2	2	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	
1	0	0	2	2	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp-	Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2				Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp12.240.000	Rp12.240.000	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	Rp-	Rp-	Rp12.240.000	100,00	Rp12.240.000	100,00	
1	0	0	2	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)			Rp-		Rp-		Rp-	Rp-	Rp-		Rp-		

1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp19.040.000	Rp19.040.000	Rp19.040.000	100,00	Rp19.040.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp19.040.000	100,00	Rp19.040.000	100,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-	Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp24.905.000	Rp24.905.000	Rp24.905.000	100,00	Rp24.905.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp24.905.000	100,00	Rp24.905.000	100,00
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp24.905.000	Rp24.905.000	Rp24.905.000	100,00	Rp24.905.000	100,00									
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp24.905.000	Rp24.905.000	Rp24.905.000	100,00	Rp24.905.000	100,00						Rp24.905.000	100,00	Rp24.905.000	100,00
PUSKESMAS SAMBI						Rp1.165.000.565	Rp1.165.000.565	Rp934.381.860	80,20	Rp1.174.154.565	100,79		Rp-		Rp-	#DIV/0!	Rp934.381.860	80,20	Rp1.174.154.565	100,79
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp1.160.920.565	Rp1.160.920.565	Rp930.301.860	80,13	Rp1.158.664.565	99,81		Rp-		Rp-		Rp930.301.860	80,13	Rp1.158.664.565	99,81
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.420.000	Rp9.420.000	Rp3.084.000	32,74	Rp3.084.000	32,74		Rp-				Rp3.084.000	32,74	Rp3.084.000	32,74
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp9.420.000	Rp9.420.000	Rp3.084.000	32,74	Rp3.084.000	32,74		Rp-				Rp3.084.000	32,74	Rp3.084.000	32,74
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.151.500.565	Rp1.151.500.565	Rp927.217.860	80,52	Rp1.155.580.565	100,35		Rp-		Rp-		Rp927.217.860	80,52	Rp1.155.580.565	100,35
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp30.600.000	Rp30.600.000	Rp30.600.000	100,00	Rp30.600.000	100,00		Rp-				Rp30.600.000	100,00	Rp30.600.000	100,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp-				Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp-	Rp-	Rp-		Rp4.080.000			Rp-				Rp-		Rp4.080.000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp89.460.000	Rp89.460.000	Rp89.460.000	100,00	Rp89.460.000	100,00		Rp-				Rp89.460.000	100,00	Rp89.460.000	100,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp28.350.000	Rp28.350.000	Rp28.350.000	100,00	Rp28.350.000	100,00		Rp-				Rp28.350.000	100,00	Rp28.350.000	100,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp9.585.000	Rp9.585.000	Rp9.585.000	100,00	Rp9.585.000	100,00		Rp-				Rp9.585.000	100,00	Rp9.585.000	100,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp-							Rp-				Rp-		Rp-	

1	0 2	0 2	2 02	0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp-		Rp-					Rp-				Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp6.390.000	Rp6.390.000	Rp6.390.000	100,00	Rp6.390.000	100,00		Rp-				Rp6.390.000	100,00	Rp6.390.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp2.130.000	Rp2.130.000	Rp2.130.000	100,00	Rp2.130.000	100,00		Rp-				Rp2.130.000	100,00	Rp2.130.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp23.560.000	Rp23.560.000	Rp21.300.000	90,41	Rp23.560.000	100,00		Rp-				Rp21.300.000	90,41	Rp23.560.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp-	Rp-			Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	1	0 2	2 02	1 4	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp252.481.175	Rp252.481.175	Rp203.760.000	80,70	Rp252.481.175	100,00		Rp-				Rp203.760.000	80,70	Rp252.481.175	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp6.390.000	Rp6.390.000	Rp6.390.000	100,00	Rp6.390.000	100,00		Rp-				Rp6.390.000	100,00	Rp6.390.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp8.520.000	Rp8.520.000	Rp8.520.000	100,00	Rp8.520.000	100,00		Rp-				Rp8.520.000	100,00	Rp8.520.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp82.910.000	Rp82.910.000	Rp82.890.000	99,98	Rp82.910.000	100,00		Rp-				Rp82.890.000	99,98	Rp82.910.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp10.380.000	Rp10.380.000	Rp4.260.000	41,04	Rp10.380.000	100,00		Rp-				Rp4.260.000	41,04	Rp10.380.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp25.560.000	Rp25.560.000	Rp25.560.000	100,00	Rp25.560.000	100,00		Rp-				Rp25.560.000	100,00	Rp25.560.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp227.665.000	Rp227.665.000	Rp197.375.000	86,70	Rp227.665.000	100,00		Rp-				Rp197.375.000	86,70	Rp227.665.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp115.063.200	Rp115.063.200	Rp95.707.884	83,18	Rp115.063.200	100,00		Rp-				Rp95.707.884	83,18	Rp115.063.200	100,00
1	0 2	0 2	2 02	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	3 2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		
1	0 2	0 2	2 02	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp213.456.190	Rp213.456.190	Rp95.939.976	44,95	Rp213.456.190	100,00		Rp-				Rp95.939.976	44,95	Rp213.456.190	100,00
1	0 2	0 2	2 02	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp-				Rp-			Rp-			Rp-		Rp-		

1	0 2	0 2	2 02	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp12.780.000	Rp12.780.000	Rp12.780.000	100,00	Rp12.780.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp12.780.000	100,00	Rp12.780.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp-		Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	3 9				Rp-		Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	4 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Rp2.130.000	Rp2.130.000	Rp2.130.000	100,00	Rp2.130.000	100,00		Rp-				Rp2.130.000	100,00	Rp2.130.000	100,00
1	0 2	0 2	2 02	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)					Rp-			Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 2	2 02	4 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp4.090.000	Rp4.090.000	Rp4.090.000	100,00	Rp4.090.000	100,00		Rp-				Rp4.090.000	100,00	Rp4.090.000	100,00
1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp-	Rp-			Rp11.410.000			Rp-		Rp-		Rp-		Rp11.410.000	
1	0 2	0 3	2 02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	0 2	0 3	2 02	0 2	Penenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp-	Rp-						Rp-		Rp-		Rp-		Rp-	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00		Rp-		Rp-		Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00
1	2	5	2 03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00						Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00
1	0 2	0 5	2 03	0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp4.080.000	Rp4.080.000	Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00						Rp4.080.000	100,00	Rp4.080.000	100,00

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan capaian indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan hingga sampai dengan triwulan IV faktor pendorong dan penghambat pencapaian target adalah :

4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT.

1. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan
- b. Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah dalam jumlah yang cukup di Puskesmas dan jaringannya.
- c. Tersedianya alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-fisik.
- d. Tersedianya kader kesehatan di seluruh Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
- e. Dukungan lintas sektor cukup memberikan kontribusi.
- f. Meningkatnya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayan kesehatan dan kader kesehatan.

2. Faktor Penghambat

- a. Kemampuan teknis dan manajemen sumberdaya manusia (SDM) kesehatan di Puskesmas dan jaringannya belum merata.
- b. Masih terdapat Puskesmas dengan peralatan kesehatan yang belum memenuhi standar.
- c. Rendahnya minat tenaga kesehatan khususnya dokter gigi bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.
- d. Penyerapan /realisasi untuk anggaran bersumber pusat, dapat dilaksanakan awal bulan mei terkendala persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
- e. Kesulitan informasi dalam pelaporan capaian kinerja dari pemegang program sehingga menghambat proses pelaporan (internal).

- f. Dalam penyerapan anggaran terkait anggaran pusat menjadi kendala penyerapan/spj dengan adanya juknis yang mensyaratkan dalam pelaksana pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan bagi tenaga berstatus ASN sehingga kegiatan dilapangan bersifat dibatasi dalam pertanggungjawaban penganggarnya. Sedangkan dari Kabupaten sendiri untuk proses pertanggungjawaban administrasi masih harus melalui beberapa tahapan yang menggunakan waktu lama dimulai dari penginputan usulan anggaran, persetujuan sampai verifikasi anggaran. Sehingga proses pencairan dana dapat dilakukan dapat dilakukan di pertengahan tahun.

4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN BERIKUTNYA

Tindak lanjut yang dapat diambil untuk meningkatkan pencapaian target :

- a. Menindaklanjuti rekomendasi Audit Maternal Perinatal untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatus.
- b. Meningkatkan pembinaan Posyandu Mandiri dan UKBM Lainnya
- c. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis program ke Puskesmas.
- d. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam komunikasi, koordinasi dan pelaporan dari Puskesmas.
- e. Memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- f. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- g. Memprioritaskan tenaga kontrak daerah yang sudah ada untuk bersaing menjadi status tenaga P3k.
- h. Mengaktifkan kunjungan rumah dengan protokol kesehatan ketat.
- i. Melaksanakan pengadaan alat kesehatan di beberapa puskesmas .
- j. Penataan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

BAB V

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 sebesar 85,62 % dengan peringkat kinerja Tinggi.
- b. Capaian kinerja keuangan 92,82% dengan realisasi anggaran sebesar - . Rp.149.126.266.168,00 sehingga masuk dalam peringkat kinerja sangat tinggi.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa tenaga kesehatan yang sudah terlatih dalam kompetensi tertentu berpindah tugas sehingga memerlukan proses restorasi;
- b. Kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kedaruratan KIA/PONED yang masih belum sesuai standar;
- d. Masih adanya persepsi masyarakat tentang sistem rujukan sehingga mengakibatkan masyarakat yang seharusnya dirujuk tetapi tidak mau di rujuk dan mengakibatkan kegagalan rujukan;
- c. Adanya *refocusing* anggaran menghambat kegiatan-kegiatan pelayanan SPM bidang kesehatan.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Kesehatan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan konsolidasi dan pembinaan kepada semua fasilitas kesehatan baik pemerintah atau swasta agar mampu memberikan pelayanan yang berdampak pada peningkatan kualitas sehingga akan menurunkan resiko kematian akibat kesehatan;
- b) Dalam rangka manajemen sumber daya, kesehatan dinas kesehatan telah berusaha mendistribusi tenaga kesehatan ke seluruh faskes di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat agar memenuhi standar jenis maupun kompetensi tenaga kesehatan walaupun belum mencapai 100%;
- c) Meningkatkan kerjasama lintas sektor yang terkait dengan pelayanan yang berdampak dengan peningkatan UHH.

5.1 KESIMPULAN

1. Sasaran strategis untuk tahun 2023, mengikuti Renstra 2023 - 2026 dengan penyesuaian RPD Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang Kesehatan. Yakni :

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan meliputi Angka Kematian Ibu per 100.000 KH realisasi 163,39 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi per 1.000 KH realisasi 6,76 per 1.000 KH , Prevalensi Balita Stunting realisasi 3,84, Insidensi TB per 100.000 penduduk realisasi 280,55 per 100.000 penduduk, Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV realisasi 0,39 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV.
3. Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan meliputi Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) realisasi 92,12 %.
4. Meningkatnya kualitas layanan puskesmas dan Labkesda dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) realisasi nilai rata-rata 85,37.

5.2 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan cakupan pemenuhan indikator sasaran sesuai target beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pemantauan bayi baru lahir dengan risiko tinggi sejak berada didalam kandungan.
2. Meningkatkan kemampuan teknis penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir bagi tenaga Puskesmas.
3. Meningkatkan Deteksi Dini kepada Ibu hamil yang beresiko di tingkat fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap SOP Rujukan
5. Meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan sesuai standar di Puskesmas
6. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

